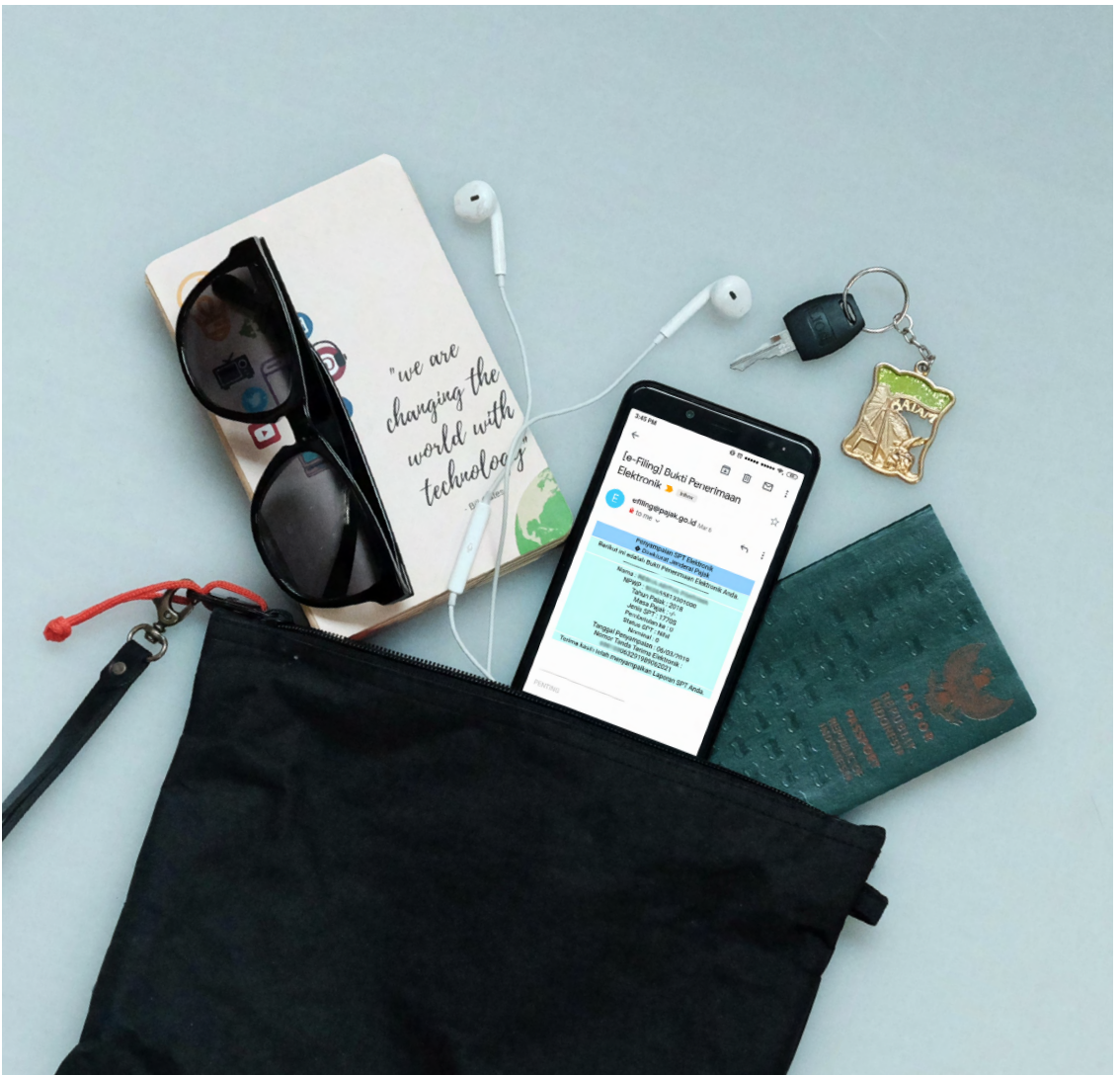




APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA



Scan untuk Unduh

Lapor SPT:
Lebih Awal - Lebih Nyaman

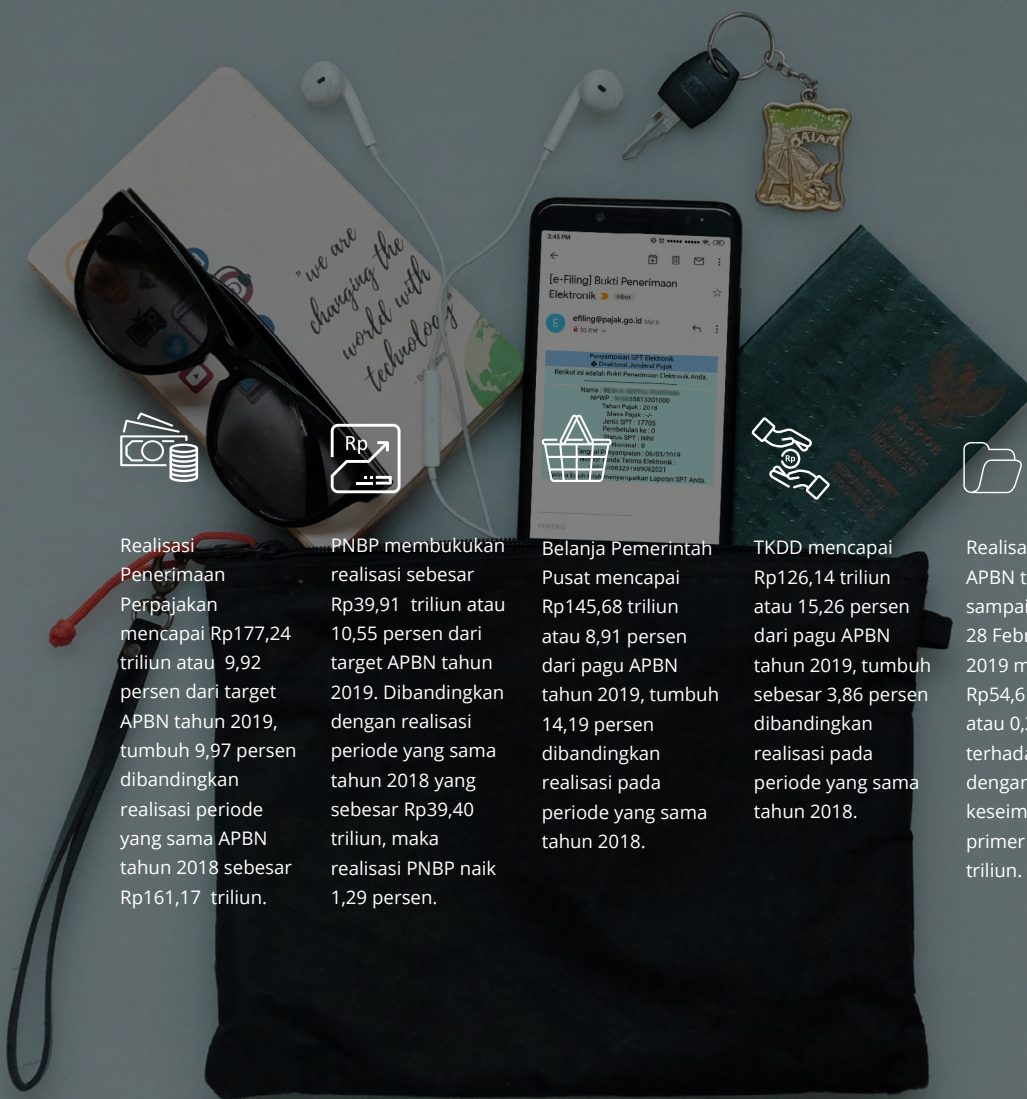




“Saya lama bekerja di Bank Dunia, saya perhatikan negara-negara yang maju itu pasti memiliki tiga aspek ini yang paling penting, yakni institusi, human capital dan juga infrastruktur,”

“Infrastruktur adalah salah satu persyaratan. Negara yang memiliki infrastruktur baik itu punya kans untuk maju menjadi negara dengan berpenghasilan tinggi. Karena dengan infrastruktur berkualitas baik maka penduduknya mampu memiliki produktivitas tinggi,”

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati



Realisasi
Penerimaan
Perpajakan
mencapai Rp177,24
triliun atau 9,92
persen dari target
APBN tahun 2019,
tumbuh 9,97 persen
dibandingkan
realisasi periode
yang sama APBN
tahun 2018 sebesar
Rp161,17 triliun.

PNBP membukukan
realisasi sebesar
Rp39,91 triliun atau
10,55 persen dari
target APBN tahun
2019. Dibandingkan
dengan realisasi
periode yang sama
tahun 2018 yang
sebesar Rp39,40
triliun, maka
realisasi PNBP naik
1,29 persen.

Belanja Pemerintah
Pusat mencapai
Rp145,68 triliun
atau 8,91 persen
dari pagu APBN
tahun 2019, tumbuh
14,19 persen
dibandingkan
realisasi pada
periode yang sama
tahun 2018.

TKDD mencapai
Rp126,14 triliun
atau 15,26 persen
dari pagu APBN
tahun 2019, tumbuh
sebesar 3,86 persen
dibandingkan
realisasi pada
periode yang sama
tahun 2018.

Realisasi Defisit
APBN tahun 2019
sampai dengan
28 Februari
2019 mencapai
Rp54,61 triliun
atau 0,34 persen
terhadap PDB,
dengan nilai defisit
keseimbangan
primer Rp20,56
triliun.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Momentum pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 tetap terjaga dengan pertumbuhan PDB tahun 2018 sebesar 5,17 persen.

Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya, meskipun ketidakpastian ekonomi global masih akan berlanjut di tahun 2019, kinerja perekonomian 2018 diperkirakan akan memberikan landasan kuat di tahun 2019. Stabilitas ekonomi juga tetap terkendali dengan inflasi dan nilai tukar rupiah pada tingkat yang relatif terjaga. Pemerintah juga akan terus berupaya memperbaiki neraca perdagangan dengan meningkatkan kinerja ekspor guna lebih memperkuat fundamental ekonomi.

Sampai dengan bulan Februari tahun 2019, kinerja realisasi pendapatan negara dan hibah secara umum masih menunjukkan tren yang positif.

Hingga akhir Februari 2019 realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp217,21 triliun atau 10,03 persen dibandingkan target dalam APBN 2019, tumbuh 8,21 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Realisasi pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan mencapai Rp177,24 triliun, PNBP sebesar Rp39,91 triliun, dan penerimaan hibah mencapai Rp62,7 miliar atau masing-masing telah mencapai 9,92 persen, 10,55 persen, dan 14,40 persen terhadap target yang ditetapkan pada APBN 2019.

Komponen penerimaan perpajakan yaitu penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai, masing-masing telah mencapai Rp160,84 triliun dan Rp16,39 triliun, atau 10,20 persen dan 7,85 persen dibandingkan target dalam APBN 2019. Realisasi pencapaian penerimaan pajak tersebut terutama didukung oleh Penerimaan PPh nonmigas dari PPh 21, PPh 22 Impor, PPh 25/29 Badan, dan PPh Final, serta penerimaan PPN dari PPN impor. Sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai terutama didorong oleh penerimaan cukai yang tumbuh signifikan serta penerimaan bea masuk (BM) yang masih tumbuh seiring dengan masih tingginya aktivitas impor.

Realisasi penerimaan pajak antara lain didukung oleh PPh nonmigas yang tumbuh sebesar 13,48 persen (yoy). Pencapaian ini didukung oleh pertumbuhan penerimaan PPh 21, PPh 22 Impor, PPh 25/29 Badan, dan PPh Final yang masing-masing tercatat tumbuh sebesar 15,67 persen (yoy), 3,96 persen (yoy), 40,44 persen (yoy), dan 3,58 persen (yoy). Beberapa faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan penerimaan PPh nonmigas diantaranya aktivitas perdagangan internasional Indonesia yang masih cukup tinggi, terutama aktivitas impor, dan masih tumbuhnya sector usaha pertambangan, serta sector transportasi dan pergudangan sebagai sinyal positif aktivitas ekonomi. Selain itu, penerimaan PPh migas hingga akhir Februari masih

tercatat tumbuh cukup signifikan sebesar 34,85 persen (yoy), yang antara lain dipengaruhi oleh masih cukup tingginya harga ICP.

Penerimaan kepabeanan dan cukai juga masih menunjukkan kinerja dan pencapaian yang positif, yaitu tumbuh mencapai 119,05 persen (yoy). Realisasi ini terutama didukung oleh penerimaan cukai yang tumbuh signifikan sebesar 768,89 persen (yoy) dan penerimaan BM tumbuh mencapai 4,76 persen (yoy), sedangkan penerimaan BK pertumbuhannya negatif 29,49 persen (yoy). Capaian tersebut antara lain dipengaruhi faktor aktivitas perdagangan internasional, dampak positif kebijakan kepabeanan dan cukai melalui program PIBT dan PCBT serta PEBT. Realisasi penerimaan cukai tumbuh cukup signifikan terutama dipengaruhi penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) yang tumbuh lebih dari 1.600 persen (yoy). Penerimaan CHT pertumbuhannya dipengaruhi pergeseran pola pelunasan pita cukai, masih tumbuhnya produksi CHT, dan dampak positif program penertiban cukai berisiko tinggi. Lebih lanjut, cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) realisasi penerimaannya tercatat tumbuh 3,89 persen (yoy), sedangkan cukai yang bersumber dari penerimaan etil alkohol (EA) justru tumbuh negatif 16,59 persen (yoy).

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai bulan Februari 2019 telah mencapai Rp39,91 triliun atau 10,55 persen dari target

APBN tahun 2019. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan PNBP pada periode yang sama tahun 2018 yang mencapai Rp39,40 triliun. Realisasi Penerimaan PNBP yang bersumber dari Sumber Daya Alam (SDA) mencapai Rp21,42 triliun atau 11,2 persen dibandingkan target dalam APBN 2019, sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp21,72 triliun. Penerimaan SDA antara lain dipengaruhi oleh tren pergerakan harga komoditas khususnya ICP dan harga Acuan Batubara (HBA). Rata-rata ICP bulan Januari-Februari 2019 tercatat sebesar USD58,93 per barel, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai USD63,60 per barel. Sedangkan rata-rata HBA pada periode Januari-Februari 2019 mencapai USD92,11 per ton, juga lebih rendah dibandingkan HBA periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar USD98,12 per ton. Sementara itu, penerimaan negara yang bersumber dari Pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan masih sangat rendah, yaitu Rp2,3 miliar sepanjang 2 bulan pertama di tahun 2019.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Februari 2019 mencapai Rp271,83 triliun (11,04 persen dari pagu APBN 2019), meningkat 9,15 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp145,68 triliun dan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp126,14 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga Februari tahun 2019 tumbuh sebesar 14,19 persen, antara lain dipengaruhi oleh realisasi belanja bantuan sosial yang mencapai Rp23,60 triliun atau tumbuh 70,10 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Meningkatnya kinerja penyerapan bantuan sosial tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk senantiasa menjaga daya beli serta melindungi masyarakat miskin dan rentan.

Pemerintah juga secara konsisten terus melakukan pengelolaan belanja subsidi yang sangat penting dalam upaya menjaga daya beli masyarakat, dengan tetap memperhatikan realisasi asumsi ekonomi makro APBN dan kesinambungan pengelolaan keuangan negara. Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Februari 2019 mencapai Rp10,72 triliun atau 4,78 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN. Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi Rp10,40 triliun dan subsidi nonenergi Rp0,32 triliun. Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Februari 2019 lebih besar Rp1,76 triliun atau 19,67 persen dibandingkan realisasi belanja subsidi pada periode yang sama tahun 2018.

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan Februari 2019 mencapai Rp126,14 triliun atau 15,26 persen dari pagu APBN 2019, yang meliputi Transfer

ke Daerah (TKD) sebesar Rp121,15 triliun (16,01 persen) dan Dana Desa Rp5,00 triliun (7,14 persen).

Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari Dana Perimbangan Rp120,05 triliun (16,57 persen), Dana Insentif Daerah (DID) Rp0,92 triliun (9,21 persen), dan Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan DIY Rp0,18 triliun (15,00 persen). Realisasi TKD sampai dengan Februari 2019 tersebut lebih tinggi Rp4,92 triliun atau sekitar 4,23 persen bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2018. Tingginya realisasi TKD sampai dengan Februari 2019 tersebut terutama disebabkan karena: (1) penyaluran DAU yang lebih tinggi 4,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya; (2) realisasi DBH yang meningkat sekitar 19,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya karena adanya peningkatan realisasi pada DBH Sumber Daya Alam; serta (3) meningkatnya realisasi Dana Insentif Daerah karena adanya penyaluran lebih cepat hingga bulan Februari 2019, apabila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya karena belum ada realisasi. Sementara itu, realisasi Dana Desa sampai dengan Februari 2019 lebih rendah Rp0,23 triliun (-4,43 persen) dibandingkan realisasi Dana Desa pada periode yang sama tahun 2018. Hal tersebut dipengaruhi oleh realisasi penyerapan Dana Desa hingga Februari 2019 belum optimal, terutama karena beberapa daerah yang masih berproses dalam administrasi

penyaluran, penyusunan Perda APBD, dan peraturan kepala daerah sebagai salah satu persyaratan dalam penyaluran Dana Desa.

Keberlanjutan fiskal di tahun 2019 diharapkan akan tetap terjaga. Realisasi defisit APBN hingga Februari 2019 mencapai Rp54,61 triliun atau sekitar 0,34 persen PDB.

Realisasi defisit tersebut lebih rendah dari realisasi defisit di periode tahun sebelumnya, baik secara nominal maupun persentase terhadap PDB. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah yang senantiasa menjaga pengelolaan APBN yang sehat dan berkelanjutan. Realisasi pembiayaan anggaran hingga Februari 2019 tercatat sudah mencapai Rp197,56 triliun, yang meliputi pembiayaan utang Rp198,37 triliun, pembiayaan investasi kepada BLU Rp2 triliun dan pemberian pinjaman Rp1,20 triliun. Adapun realisasi pembiayaan utang tersebut terdiri dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp197,10 triliun dan pinjaman (neto) sebesar Rp1,27 triliun. Pemerintah akan terus berkomitmen untuk menjaga rasio utang pada level yang aman dan terkendali.

REALISASI APBN 2019 s/d 28 Februari 2019



	APBN 2019	Realisasi s.d. 28 Februari	% thd APBN
 PENDAPATAN NEGARA (A)	2.165,11	217,21	10,03%
 BELANJA NEGARA (B)	2.461,11	271,83	11,04%
 KESEIMBANGAN PRIMER	(20,11)	(20,56)	
 SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	(296,00)	(54,61)	18,45%
 PEMBIAYAAN ANGGARAN	296,00	197,56	66,74%

dalam triliun Rupiah

Realisasi APBN sampai dengan Februari 2019

Perkembangan realisasi APBN tahun 2019 sampai dengan 28 Februari 2019 menunjukkan capaian positif dengan pendapatan negara mampu tumbuh 8,21 persen dan belanja negara meningkat 9,15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan kombinasi realisasi tersebut, defisit anggaran terkendali pada level 0,34 persen terhadap PDB.

Secara ringkas realisasi APBN 2019 periode sampai dengan 28 Februari 2019 sebagai berikut: Pendapatan negara mencatatkan nilai realisasi sebesar Rp217,21 triliun atau 10,03 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 8,21 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yang mencapai Rp200,72 triliun. Adapun rincian realisasi pendapatan negara meliputi:

- a. Realisasi Penerimaan Perpajakan mencapai Rp177,24 triliun atau 9,92 persen dari target

APBN tahun 2019, tumbuh 9,97 persen dibandingkan realisasi periode yang sama APBN tahun 2018 sebesar Rp161,17 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan terdiri atas :

- Realisasi Penerimaan Pajak mencapai Rp160,84 triliun atau 10,20 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 4,66 persen.
 - Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai mencapai Rp16,39 triliun atau 7,85 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 119,05 persen.
- b. PNBPN membukukan realisasi sebesar Rp39,91 triliun atau 10,55 persen dari target APBN tahun 2019. Dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2018 yang sebesar Rp39,40 triliun, maka realisasi PNBPN naik 1,29 persen.

Selanjutnya, realisasi belanja negara mencapai Rp271,83 triliun atau 11,04 persen dari pagu APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 9,15 persen dibandingkan realisasi APBN pada periode yang sama tahun 2018. Realisasi tersebut terdiri atas :

- a. Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp145,68 triliun atau 8,91 persen dari pagu APBN tahun 2019, tumbuh 14,19 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2018
- b. TKDD mencapai Rp126,14 triliun atau 15,26 persen dari pagu APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 3,86 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2018.

Dengancapaian pendapatan negara dan belanja negara tersebut, maka realisasi Defisit APBN tahun 2019 sampai dengan 28 Februari 2019 mencapai Rp54,61 triliun atau 0,34 persen terhadap PDB, dengan nilai defisit keseimbangan primer Rp20,56

triliun. Realisasi Defisit APBN tahun 2019 tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan defisit anggaran periode yang sama tahun 2018 yakni Rp48,31 triliun atau 0,33 persen PDB, dengan nilai defisit keseimbangan primer Rp13,88 triliun. Selanjutnya untuk realisasi pembiayaan anggaran periode sampai dengan 28 Februari 2019 sebesar Rp197,56 triliun, termasuk untuk pembiayaan investasi Rp2,00 triliun.

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Stabilitas ekonomi nasional tetap terus terjaga, menjadi landasan kuat dalam pengelolaan ekonomi tahun 2019

Momentum pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada tahun 2018 menjadi landasan kuat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global di tahun 2019.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 lebih didukung oleh permintaan domestik. Meskipun pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melandai, namun dengan landasan kinerja ekonomi tahun 2018 tersebut dan stabilitas ekonomi yang tetap terjaga, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan masih dalam kisaran target. Selain itu, percepatan pembagunan infrastruktur dan perbaikan deregulasi yang telah dilaksanakan diharapkan akan meningkatkan produktivitas perekonomian dan mendukung pencapaian target pertumbuhan. Perundingan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok diharapkan akan menghasilkan kesepakatan positif yang akan memberikan kepastian dan mengurangi sentimen negatif

perekonomian global.

Perkembangan harga di tingkat konsumen pada bulan Februari 2019 mencerminkan terjadinya deflasi karena penurunan harga sejumlah komoditas pangan. Deflasi terjadi sebesar 0,08 persen (mtm) dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas peternakan (daging dan telur ayam ras) serta hortikultura (bawang merah, aneka cabai, wortel, dan jeruk) karena melimpahnya pasokan seiring masuknya masa panen dan kembali normalnya permintaan pasca libur Hari Raya Natal dan akhir tahun. Tekanan inflasi pada komoditas beras relatif mengalami penurunan dibanding bulan lalu seiring dengan mulai masuknya musim panen di beberapa daerah. Sementara itu, inflasi komponen administred price relatif stabil meskipun sedikit mengalami tekanan yang dipengaruhi oleh masih tingginya inflasi tarif angkutan udara, berbeda dengan pola historisnya yang mencatatkan deflasi pada periode low season

(triwulan pertama). Namun, inflasi komponen ini sedikit tertahan karena penurunan harga BBM nonsubsidi dengan variasi hingga Rp800 per liter untuk jenis Pertamina series dan solar nonsubsidi, serta Rp100 per liter untuk jenis Premium di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) sebagai tindak lanjut penyeragaman harga BBM di seluruh wilayah Indonesia. Laju inflasi komponen inti masih bergerak stabil mencerminkan tetap terjaganya keseimbangan permintaan dan penawaran. Secara tahunan, inflasi mencapai 2,57 persen (yoy), jauh lebih rendah dibanding Februari 2018 yang sebesar 3,18 persen (yoy).

Tren penguatan Rupiah masih berlanjut dan per 15 Maret 2019 nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tercatat pada level Rp14.310 per dolar Amerika Serikat.

Dengan demikian, Rupiah mengalami apresiasi sebesar 1,07 persen dibandingkan awal tahun 2019. Faktor utama yang mempengaruhi penguatan rupiah adalah ekspektasi kenaikan FFR

yang relatif mereda dan peningkatan capital inflow. Meskipun mengalami penguatan, Pemerintah tetap terus mewaspadaai beberapa risiko-risiko global yang dapat memberikan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah. Sementara itu, cadangan devisa Indonesia bera pada level yang cukup tinggi, yakni sebesar USD123,3 miliar pada akhir Februari 2019, meningkat dibandingkan posisi akhir Januari 2019 sebesar USD120,1 miliar. Posisi cadangan devisa ini masih setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Posisi cadangan devisa tersebut diyakini akan mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Pada bulan Februari 2019, nilai ekspor tercatat sebesar USD12,53 miliar dan impor sebesar 12,2 miliar, sehingga neraca perdagangan

mengalami surplus sebesar USD0,33 miliar. Capaian surplus neraca perdagangan ini sebagai gambaran hasil komitmen pemerintah dalam memperbaiki neraca perdagangan melalui berbagai kebijakan yang telah diterapkan. Nilai ekspor pada bulan Februari 2019 tersebut menurun sebesar 10,03 persen dibandingkan dengan nilai ekspor Januari 2019. Sementara itu, impor menurun sebesar 18,61 persen dibandingkan nilai impor pada Januari 2019. Selama periode Januari Februari 2019, neraca perdagangan masih tercatat defisit sebesar USD0,73 miliar, namun lebih rendah dari capaian periode yang sama tahun 2018 yang tercatat sebesar USD0,81 miliar.

Perkembangan neraca perdagangan nasional tidak terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi dan perdagangan global, namun pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah dan kebijakan guna penguatan neraca perdagangan. Diantaranya,

pada tanggal 12 Februari 2019, Kementerian Keuangan melakukan penyederhanaan aturan ekspor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (completely built up/CBU) dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2019. Kemudahan prosedur ekspor ini ditujukan untuk meningkatkan ekspor kendaraan bermotor CBU. Selain itu, penandatanganan kerjasama *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)* diharapkan akan membuka peluang peningkatan ekspor Indonesia. Melalui IA-CEPA, Australia akan menghapuskan tarif impor 100 persen atas sebanyak 6.747 jenis barang asal Indonesia masuk ke Australia. Sebaliknya, Indonesia akan menghapuskan tarif impor 94 persen atas sebanyak 10.252 jenis barang impor Australia. IA-CEPA akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari parlemen masing-masing negara.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

LAPOR PAJAK, SEKARANG BANYAK KEMUDAHAN



Musim itu telah tiba, musim penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang mulai bergulir sejak Januari sampai dengan April 2019. Untuk wajib pajak orang pribadi berakhir pada 31 Maret 2019, sedangkan wajib pajak badan pada 30 April 2019. Tahun ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengubah beberapa proses bisnis penyampaian SPT Tahunan sehingga memberikan kemudahan dan pelayanan yang lebih baik lagi bagi wajib pajak.

Alternatif Penyampaian SPT yang Beragam

Terdapat beberapa alternatif bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT, yaitu disampaikan melalui e-filing, langsung ke kantor pajak (KPP dan KP2KP), pos dengan bukti pengiriman surat, atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Untuk penyampaian SPT via e-filing, saat ini DJP telah menyediakan tiga saluran bagi wajib pajak antara lain: laman DJP, saluran lain yang ditetapkan DJP, dan laman penyalur

SPT elektronik. Laman DJP dapat diakses di www.djponline.pajak.go.id yang menyediakan kanal pelaporan untuk semua jenis SPT Tahunan, SPT Masa PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 15, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPN 1111.

Laman ini juga menyediakan aplikasi e-Form sebagai saluran lain yang ditetapkan DJP dan dapat digunakan untuk melaporkan SPT Tahunan jenis formulir 1770 S, 1770, dan 1771. Aplikasi ini mempunyai keunggulan yaitu setelah diunduh dari sistem dapat diisi di luar jaringan (off-line), sehingga menghemat penggunaan data internet dan wajib pajak dapat menyelesaikan pengisiannya lebih dari satu waktu.

Selain aplikasi e-Form untuk penyampaian SPT Tahunan, terdapat inovasi terkait SPT Masa yaitu e-Bupot dan e-faktur. Aplikasi e-Bupot adalah aplikasi untuk membuat bukti potong PPh Pasal 23/26, membuat kode billing sesuai kode jenis pajak dan kode jenis setoran atas bukti pemotongan, dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26.

Untuk aplikasi e-faktur sendiri, pada 1 Oktober 2017 DJP telah meluncurkan aplikasi e-faktur berbasis situs (web-based) dan e-faktur host-to-host untuk memberikan kemudahan penyampaian SPT Masa PPN bagi PKP tertentu.

Penyalur SPT elektronik adalah pihak yang ditunjuk oleh DJP untuk menyalurkan SPT dalam bentuk dokumen elektronik ke DJP melalui laman Penyalur SPT elektronik dimaksud. Saat ini, terdapat tujuh Penyalur SPT elektronik yang resmi ditunjuk oleh DJP, yaitu: www.spt.co.id, www.pajakku.com, <https://eform.bri.co.id>, www.online-pajak.com, <https://aspbni.bni.co.id>, klikpajak.id, dan PT Prima Wahana Caraka (PwC).

Jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu yang hanya menyediakan empat Penyalur SPT elektronik. Penambahan ini tentunya akan makin memudahkan wajib pajak, terutama bagi wajib pajak tertentu yang wajib e-filing.

Seputar e-filing

Terdapat tiga jenis kondisi wajib pajak tertentu yang wajib menyampaikan SPT secara e-filing. Pertama, penyampaian SPT Tahunan Badan oleh wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar. Kedua, penyampaian SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik. Ketiga, penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 bagi wajib pajak badan yang telah diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 secara elektronik.

Ketentuan pelaporan secara e-filing juga wajib dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah Pusat, Bendahara Pemerintah Daerah, dan Kepala Urusan Keuangan yang belum memenuhi kewajiban penyampaian SPT dalam bentuk dokumen elektronik. Apabila Pemungut

PPN itu terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, dan/ atau sudah pernah menyampaikan SPT Masa dalam bentuk elektronik maka wajib menyampaikan SPT via e-filing.

Sekarang, wajib pajak tersebut tidak perlu lagi mengantre di KPP untuk melaporkan pajaknya. DJP juga telah merilis e-Billing versi 2.0 sebagai layanan pembuatan billing massal. Layanan ini terutama untuk memberikan kemudahan bagi Bendahara atau pemungut PPN yang mempunyai volume pembuatan Kode Billing dan transaksi pembayaran yang tinggi.

Tak Melulu e-filing

Selain beberapa wajib pajak di atas, wajib pajak lain masih dapat menyampaikan SPT secara langsung ke KPP atau KP2KP, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Kewajiban penyampaian SPT secara langsung dilakukan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) tempat wajib pajak terdaftar, termasuk Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang berada dalam wilayah KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Selain itu, DJP juga menyediakan tempat lain berupa Layanan Pajak di Luar Kantor. Layanan Pajak di Luar Kantor ini biasanya berupa Pos Pajak, Pojok Pajak atau Unit Mobil Pajak (Mobile Tax Unit/MTU) yang disediakan KPP atau KP2KP tempat wajib pajak terdaftar.

Untuk lebih memudahkan wajib pajak, DJP memberikan pengecualian bagi wajib pajak berstatus karyawan yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dengan jenis formulir 1770 S atau 1770 SS yang berstatus Nihil atau Kurang Bayar, bukan merupakan SPT Pembetulan, disampaikan dalam bentuk formulir kertas, dan disampaikan sampai dengan batas akhir pelaporan SPT Tahunan. Wajib pajak ini boleh menyampaikan SPT Tahunan ke TPT atau Layanan Pajak di Luar Kantor selain tempat dia terdaftar.

Bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat disampaikan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar, terdapat ketentuan lebih detail yang mengatur agar wajib pajak mengirimkan satu SPT dalam satu amplop tertutup dengan satu tanda bukti pengiriman surat.

Wajib pajak harus membubuhkan informasi NPWP, jenis SPT, Masa /Tahun Pajak, dan status SPT pada amplop tersebut. Selain itu, tanda bukti pengiriman surat sekurang-kurangnya harus memuat nama dan NPWP, jenis SPT, dan Masa/Tahun Pajak. Khusus untuk SPT dengan status Lebih Bayar, wajib pajak harus menggunakan layanan pengiriman khusus sehingga SPT diterima KPP selambat-lambatnya tiga hari setelah tanggal pada tanda bukti pengiriman surat.

Memberikan Kemudahan dan Menjamin Kepastian Hukum

Dengan pengaturan lebih detail terkait pengiriman SPT melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, memberikan jaminan kepastian hukum bagi wajib pajak dan memperkecil timbulnya konflik atau sengketa di kemudian hari atas status penyampaian SPT wajib pajak.

Selain itu, saat ini DJP juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melengkapi SPT. Wajib pajak yang melaporkan SPT melalui e-filing tidak perlu lagi mengunggah Surat Setoran Pajak (SSP) selama Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) pada SSP telah dicantumkan dalam SPT. Wajib pajak juga tidak perlu lagi menyatukan semua dokumen kelengkapan SPT untuk diunggah melalui e-filing. Dokumen tersebut dapat diunggah satu per satu.

Melalui penyempurnaan peraturan perpajakan dan penyederhanaan proses bisnis yang merupakan dua dari lima pilar reformasi perpajakan, DJP memastikan komitmen dan konsistensinya dalam memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Berbagai kemudahan yang disuguhkan kepada wajib pajak dan beragam inovasi di bidang teknologi merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan lagi, menuju layanan perpajakan berkelas dunia.

DI BALIK JUTAAN E-MAIL UNTUK WAJIB PAJAK

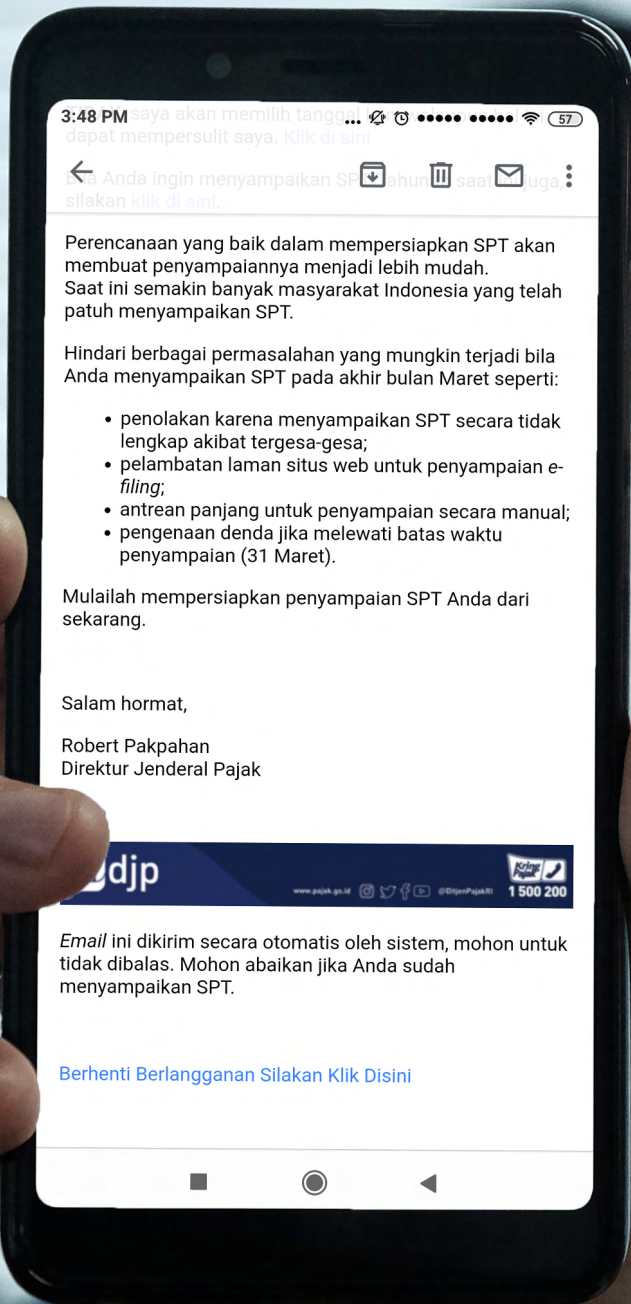
Sebagai wujud kecintaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap Wajib Pajak yang telah turut serta berkontribusi dalam pembangunan dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya, di awal Maret ini jutaan wajib pajak orang pribadi mendapatkan surat elektronik (e-mail) dari DJP, mengingatkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan lebih awal dan tidak mendekati tanggal jatuh tempo pada 31 Maret 2019. Menariknya adalah, sebagaimana halnya dengan surat cinta lainnya, banyak pikiran dan perasaan yang dicurahkan dalam penulisan surel-surel tersebut. Narasi surel yang dikirim kepada wajib pajak tersebut sebenarnya telah ditulis dengan memperhatikan perilaku wajib pajak. Sederhananya, konsep narasi surel tahun ini telah diuji berdasarkan hasil penelitian dan survei.

Pada 2018 lalu, DJP telah menguji coba implementasi pendekatan perilaku dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Uji coba ini merupakan hasil kerja sama antara DJP, World Bank, dan Behavioural

Insights Team asal Inggris. Tujuan penelitian ini untuk membantu wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunannya lebih awal. Narasinya dibuat bertujuan untuk membantu wajib pajak menyampaikan SPT Tahunannya lebih awal dibandingkan dengan narasi lainnya, sehingga wajib pajak mendapatkan pengalaman yang nyaman saat menyampaikan SPT Tahunan. Selain itu, narasi ini juga teruji dapat membuat lebih banyak wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya dibandingkan dengan narasi lainnya.

Di seluruh dunia, wajib pajak dengan jumlah yang signifikan cenderung menunggu untuk menyampaikan SPT Tahunannya saat mendekati tanggal jatuh tempo. Dari sisi wajib pajak, hal tersebut menimbulkan berbagai hambatan, di antaranya adalah harus menghadapi antrean panjang saat menyampaikan SPT Tahunan di kantor pajak maupun pelambatan laman web pajak karena banyaknya wajib pajak yang mengakses secara bersamaan.

Berdasarkan hasil survei yang



dilakukan oleh DJP, wajib pajak cenderung menunda dan telah menjadi kebiasaan dalam menyampaikan SPT tahunan. Hasil survei ini menjadi salah satu latar belakang dilakukannya penelitian berbasis perilaku wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunannya. Dalam uji coba tersebut DJP memiliki populasi sebanyak 11,2 juta wajib pajak. Jumlah sebanyak itu akan dibagi ke dalam 7 kategori secara acak. Satu kategori tidak akan dikirim surel. Sedangkan kepada enam kategori lainnya akan dikirim dengan jenis surel yang berbeda isinya masing-masing.

Enam jenis surel itu adalah control, simple reminder, guidance, planning, guidance and planning, dan national pride. Perbedaan jenis konten ini dimaksudkan untuk dapat mengukur efektivitas tiap konten surel terhadap perilaku wajib pajak. Pengiriman surel menggunakan aplikasi Newsletter Pajak berdomain pajak.go.id.

Aplikasi Newsletter Pajak sendiri adalah aplikasi yang digunakan oleh Kantor Pusat DJP untuk mengirimkan informasi perpajakan kepada para wajib pajak dengan menggunakan basis data surel yang ada pada master file wajib pajak. DJP mengirimkan surel tersebut 6 minggu sebelum batas terakhir penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Control

Pada jenis surel ini, naskah surel dimulai dengan satu paragraf panjang yang berisi dasar hukum ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT Tahunan. Persuratan dengan jenis ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh DJP dan unit-unit kerja di bawahnya ketika berkirim surat kepada wajib pajak. Kemudian di sana disebutkan empat metode pelaporan: datang langsung ke kantor pajak, pos tercatat, kurir, atau online. Dalam surel ini juga diberikan tautan khusus jika wajib pajak ingin langsung menyampaikan SPT Tahunan pada saat itu juga.

Simple Reminder

Konten dalam surel ini tidak terdapat dasar hukum ketentuan seperti pada surel berjenis control dan langsung memulainya dengan 4 metode penyampaian SPT yang tersedia. Untuk mempromosikan pelaporan lebih awal, surel menekankan agar wajib pajak tidak menunggu menyampaikan SPT Tahunan sampai batas waktu terakhir. Dalam surel itu juga dinyatakan bahwa "Saat ini semakin banyak masyarakat Indonesia yang telah patuh melaporkan SPT". Bukan tanpa maksud, melainkan banyak penelitian menunjukkan bahwa orang menyesuaikan perilakunya dengan mayoritas orang di sekitar mereka berperilaku.

National Pride

Surel ini menekankan pada kontribusi pajak terhadap pembangunan dan menegaskan wajib pajak merupakan pahlawan pembangunan. Surel melampirkan ilustrasi postur APBN 2018. Struktur pesan lebih konsisten dengan komunikasi Indonesia yang konvensional, yaitu mengutarakan secara tidak langsung. Contohnya, surel dimulai dengan penjelasan mengapa email itu dikirim dan tidak menjelaskan secara langsung manfaat dari penyampaian SPT Tahunan lebih awal.

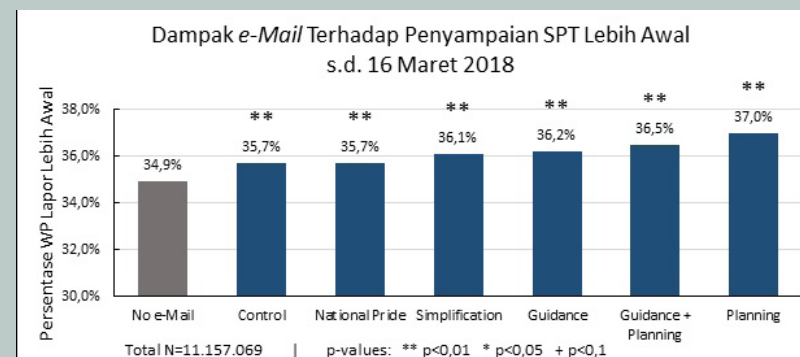
Guidance

Untuk mempermudah wajib pajak, surel ini memberikan tautan (link) ke panduan kelengkapan pengisian SPT dan Soal Sering Ditanya (FAQ). Lalu diberitahukan konsekuensinya kalau wajib pajak menunda-nunda

dan menyampaikan SPT pada akhir bulan Maret seperti penolakan dari petugas karena menyampaikan SPT secara tidak lengkap akibat tergesa-gesa, laman web yang lambat, antrean panjang di kantor pajak, dan pengenaan denda jika melewati batas waktu.

Planning

Surel jenis ini bertujuan untuk memperkuat tujuan penyampaian SPT Tahunan lebih awal dan memberikan bantuan perencanaan kepada Wajib Pajak. Untuk itu di dalam surel, DJP mencantumkan masalah-masalah yang dapat dihindari oleh wajib pajak jika melaporkan lebih awal. Kemudian surel memberikan opsi untuk memilih tanggal pelaporan sebelum 16 Maret dengan mengklik tautan. Atau jika tidak mau maka wajib pajak diberikan tautan untuk memilih tanggal lain sebelum tanggal



31 Maret. Mereka yang memasukkan tanggal akan dikirim surel pengingat dua hari sebelum tanggal yang dipilih. Surel pengingat menyarankan wajib pajak untuk menyiapkan dokumen pelaporan dan memvisualisasikan langkah-langkah yang mereka ambil dalam pelaporan SPT Tahunan, serta memberikan panduan khusus pelaporan SPT Tahunan.

Guidance and Planning

Surel jenis ini menggabungkan dua jenis sebelumnya. Wajib Pajak diberikan panduan dan meminta komitmen mereka dalam penyampaian SPT Tahunan dengan dua pilihan tanggal. Untuk mengurangi panjang email, maka di dalam surel telah dihilangkan daftar masalah jika wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan pada hari terakhir bulan Maret.

Hasil pengiriman surel pada 2018 menunjukkan surel berjenis Planning yang membantu perencanaan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan memiliki jumlah statistik yang paling tinggi. Wajib pajak

yang dikirim surel dengan jenis ini melaporkan SPT Tahunannya (sebelum tanggal 16 Maret 2019) lebih banyak daripada jenis surel lainnya dan lebih tinggi 2,1% daripada yang tidak dikirim surel sama sekali. Selisihnya ini setara 233.500 SPT Tahunan jika surel berjenis Planning dibagikan kepada 11,2 juta populasi.

Pada Maret 2019 ini telah dikirim e-mail blast kepada 11 juta wajib pajak orang pribadi yang memiliki surel. Itu setelah dikurangi dengan jumlah wajib pajak yang sudah menyampaikan SPT Tahunannya. Jadi yang dikirim oleh DJP adalah benar-benar wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan. Per tanggal 1 Maret 2019 saja terdapat lebih dari 2,7 juta wajib pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan.

Pada akhirnya upaya mengirimkankan email blast berdasarkan perilaku wajib pajak ini semata untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Untuk 2019, kita akan melihat hasilnya sebentar lagi. Usai musim SPT ini berakhir

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

PENERIMAAN PAJAK

Sampai dengan Februari, Penerimaan Pajak Terhimpun Rp160,85 Triliun

(dalam triliun Rupiah)

Realisasi Penerimaan Pajak s.d. Februari 2019

Uraian	APBN 2019	Realisasi s.d. Februari 2019		
			Δ% 2018 - 2019	% thd Target
Pajak Penghasilan	894,45	102,26	15,36%	11,43%
- Migas	66,15	10,51	34,85%	15,89%
- Non Migas	828,29	91,75	13,48%	11,08%
PPN & PPnBM	655,39	57,44	-10,40%	8,76%
PBB & Pajak Lainnya	27,71	1,14	21,51%	4,12%
Jumlah	1.577,56	160,85	4,66%	10,20%

*angka sementara per Februari 2019

Sampai dengan bulan Februari 2019, penerimaan pajak yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak mencapai Rp160,84 triliun. Capaian tersebut setara dengan 10,20 persen dari target

APBN 2019. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak periode Januari - Februari 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 4,66 persen (yoy).

Pertumbuhan penerimaan pajak ditopang oleh baiknya kinerja PPh, dengan PPh Non-Migas tumbuh 13,48 persen sedangkan PPh Migas tumbuh 34,85 persen. Apabila kita lihat lebih dalam, beberapa jenis pajak utama menunjukkan kinerja yang cukup baik, terutama PPh Pasal 25/29 dan PPh Pasal 21.

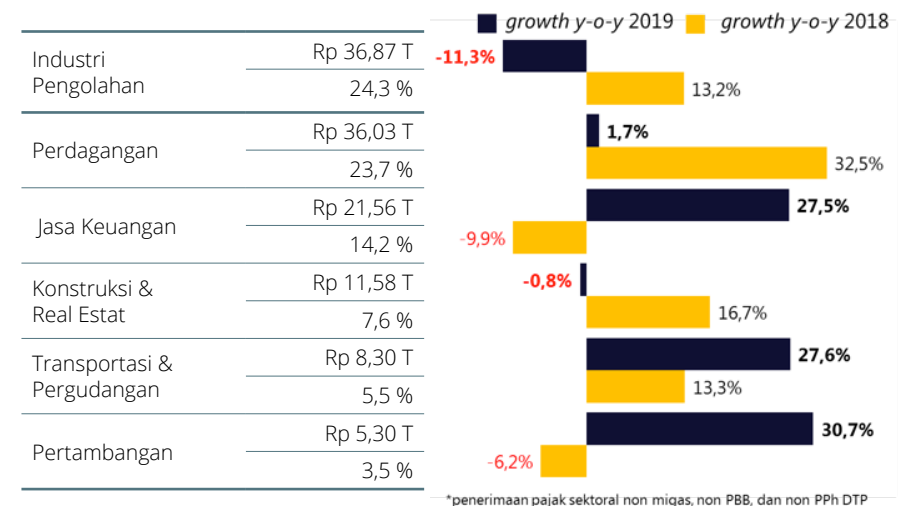
PPh Pasal 25/29 masih melanjutkan *trend* pertumbuhan *double digit* yang telah berlangsung sepanjang tahun 2018, bahkan mencapai 40,00 persen (*yoy*). PPh Badan tumbuh hingga 40,44 persen (*yoy*), sementara PPh Orang

Pribadi tumbuh hingga 28,17 persen (*yoy*).

PPh Pasal 21 dan Pasal 22 tumbuh *double digit*, dengan PPh Pasal 21 tumbuh 15,67 persen (*yoy*) sedangkan PPh Pasal 22 tumbuh 10,65 persen (*yoy*). Selama periode Januari-Februari 2019, jumlah SPT Masa PPN Lebih Bayar yang mengajukan restitusi meningkat cukup pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terdapat peningkatan jumlah SPT yang diajukan permohonan restitusi sebesar 37 persen selama periode Januari-Februari 2019 dibandingkan periode yang sama di tahun 2018.

Pertumbuhan Penerimaan Pajak

Jenis Pajak	growth (yoy)	
	Februari 2018	Februari 2019
PPh Pasal 25	7,84 %	40,00 %
- Badan	7,74 %	40,44 %
- Orang Pribadi	10,58 %	28,17 %
PPh Final	17,15 %	15,67 %
PPh Pasal 21	40,96 %	10,65 %
Pajak atas Impor	25,94 %	1,16 %
- PPh 22 Impor	30,10 %	3,96 %
- PPN Impor	25,67 %	0,79 %
- PPnBM Impor	-8,89 %	-23,58 %



*penerimaan pajak sektoral non migas, non PBB, dan non PPh DTP

Penerimaan Pajak Sektoral

Perlambatan pertumbuhan pajak-pajak atas impor terjadi seiring dengan melambatnya laju impor Indonesia. Nilai Impor Indonesia di bulan Januari 2019 mengalami penurunan 1,83 persen (*yoy*) bila dibandingkan dengan bulan Januari 2018, dari USD15,31 miliar menjadi USD15,03 miliar.

Namun demikian, pajak-pajak atas Impor masih menunjukkan pertumbuhan positif 1,16 persen (*yoy*), didorong oleh PPh Pasal 22 Impor yang tumbuh 3,96 persen (*yoy*) sedangkan PPN Impor tumbuh 0,79 persen (*yoy*). PPnBM Impor mengalami penurunan 23,58 persen (*yoy*), hal ini cukup wajar mengingat jenis barang-barang yang tergolong mewah memang merupakan target utama kenaikan tarif impor.

Ditinjau dari sisi sektoral, Pertumbuhan di bulan Januari - Februari 2019 ditopang oleh pertumbuhan sektor Perdagangan (tumbuh 1,7 persen (*yoy*)), Jasa Keuangan dan Asuransi (tumbuh 27,5 persen (*yoy*)) dan Pertambangan dan Penggalian (tumbuh 30,7 persen (*yoy*)).

KEPABEANAN DAN CUKAI

Penerimaan kepabeanaan dan cukai hingga bulan Februari 2019 tumbuh signifikan, tumbuh 119,05 persen (yoy)

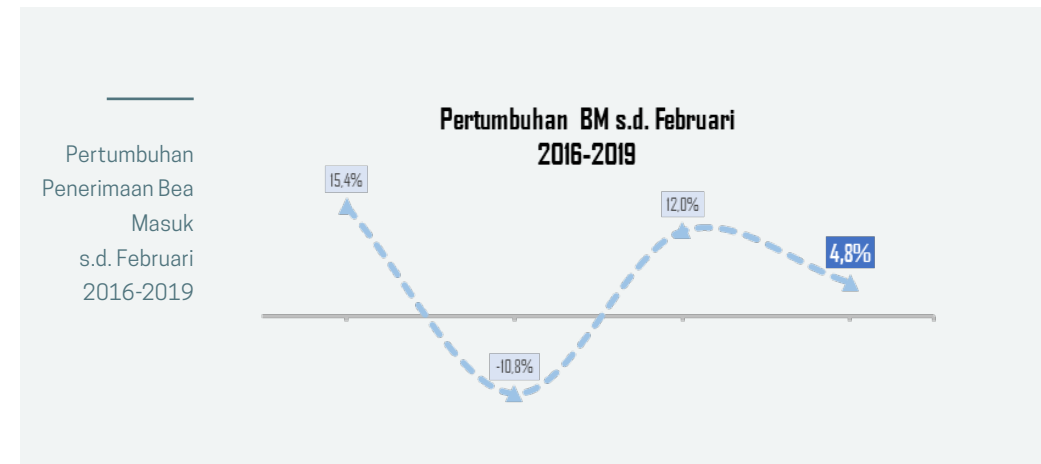
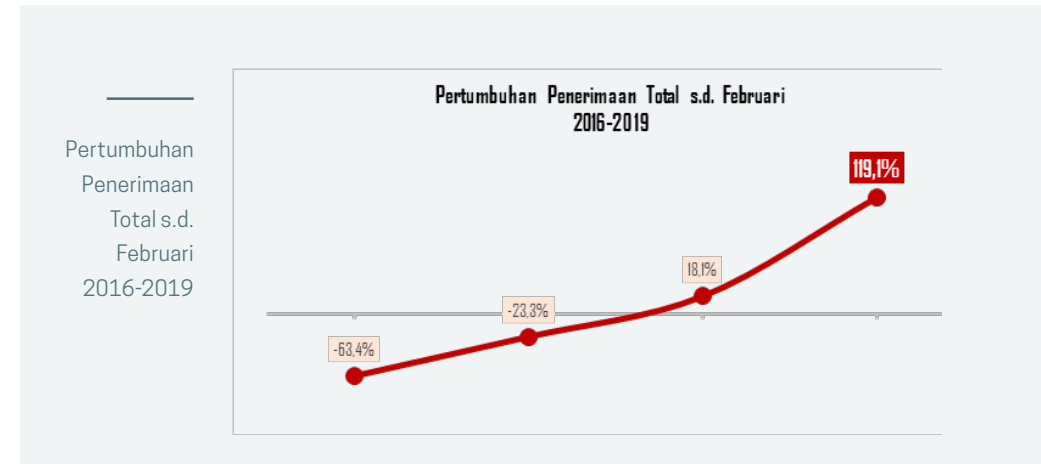
dalam triliun Rupiah

No.	Jenis Penerimaan	Target APBN	Realisasi 2019	% Capaian	Realisasi 2018	Pertumbuhan (yoy)	
						%2019	%2018
1	Bea Masuk	38.90	5.69	14.62%	5.43	4.76%	11.96%
2	Cukai	165.50	10.08	6.09%	1.16	768.89%	16.03%
3	Bea Keluar	4.42	0.63	14.27%	0.90	-29.49%	83.10%
	Total	208.82	16.39	7.85%	7.48	119.05%	18.08%
	PPN Impor		26.89		26.68	0.79%	25.67%
	PPn BM Impor		0.44		0.57	-23.58%	-8.89%
	PPh Pasal 22 Impor		8.96		8.62	3.96%	30.10%
	Total PDRI lainnya		36.29		35.87	1.16%	25.94%
	Total Bea Cukai dan Pajak		52.68		43.35	21.52%	24.51%

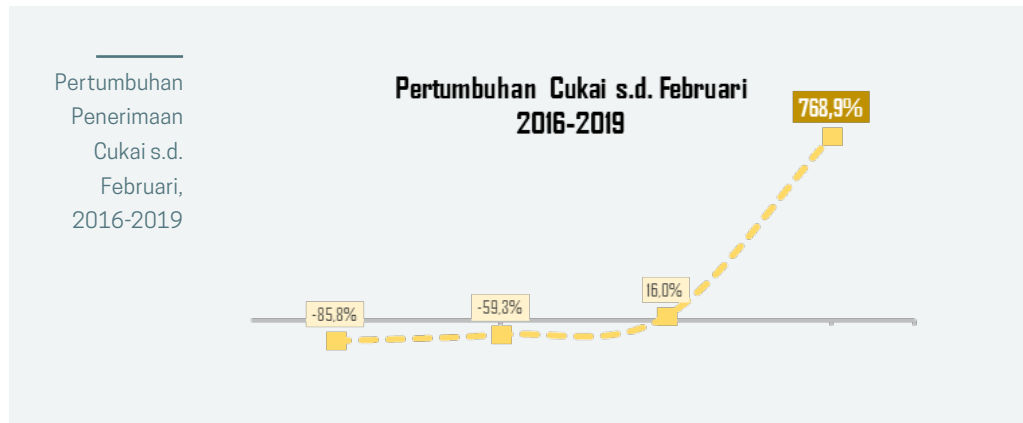
Penerimaan kepabeanaan dan cukai sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 adalah Rp16,39 triliun. Capaian tersebut merupakan 7,85 persen dari target yang diamanatkan APBN tahun 2019 sebesar Rp208,82 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, maka capaian ini tumbuh signifikan 119,05 persen. Capaian penerimaan yang signifikan tersebut dikontribusi oleh penerimaan bea masuk (BM) dan penerimaan cukai yang tumbuh positif. Penerimaan cukai

berkontribusi sangat tinggi, mengingat pertumbuhannya yang meningkat hingga 768 persen.

Penerimaan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang terdiri atas PPh pasal 22 impor, PPN impor, dan PPnBM impor, juga dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencapai Rp36,29 triliun. Capaian PDRI tersebut tumbuh sebesar 1,16 persen dibandingkan capaian bulan Februari tahun 2018. Alhasil, total penerimaan yang dikumpulkan DJBC hingga Februari 2019 adalah Rp52,68 triliun.

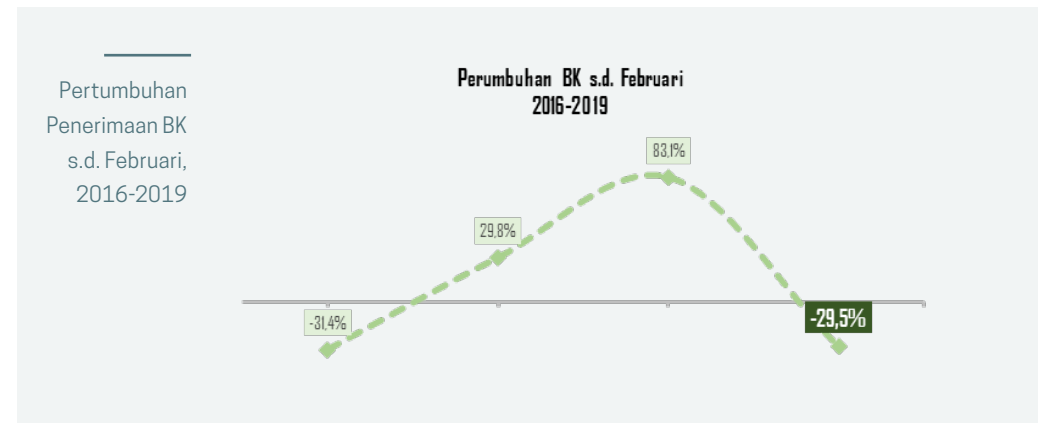


Penerimaan BM yang berhasil dikumpulkan hingga akhir bulan Februari 2019 adalah sebesar Rp5,69 triliun. Capaian penerimaan itu tumbuh 4,76 persen dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu, atau 14,62 persen dari target penerimaan BM pada APBN tahun 2019. Persentase capaian penerimaan BM merupakan yang tertinggi bila dibandingkan capaian persentase komponen penerimaan yang lain. Pertumbuhan penerimaan BM salah satunya dikontribusi oleh dampak penertiban impor berisiko tinggi (PIBT) yang merupakan bagian dari program penguatan reformasi kepabeanaan dan cukai (PRKC). Hal itu terlihat dari tumbuhnya penerimaan BM yang berasal dari extra effort sebesar 3,2 persen.



Penerimaan cukai, yang terdiri dari cukai hasil tembakau (CHT), cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA), dan cukai etil alkohol (EA), sampai dengan bulan Februari 2019 adalah sebesar Rp10,08 triliun. Capaian tersebut merupakan 6,09 persen dari target APBN tahun 2019, dan mengalami pertumbuhan sebesar 768,89 persen dibanding penerimaan cukai bulan Februari tahun 2018. Penerimaan cukai dan pertumbuhannya merupakan yang tertinggi dibandingkan komponen penerimaan yang lain. Kinerja cukai dikontribusi terutama oleh CHT dan MMEA

Kinerja penerimaan CHT sampai dengan bulan Februari 2019 mencapai Rp9,43 triliun. Kinerja tersebut membuat pertumbuhan CHT naik signifikan sebesar 1.638,21 persen, serta mencapai 5,94 persen dari target APBN tahun 2019. Kinerja pertumbuhan penerimaan CHT yang tumbuh sangat tinggi tersebut disebabkan oleh adanya pelunasan dari pembelian pita cukai di bulan Desember 2018, yang jatuh temponya di bulan Februari 2019. Kinerja CHT juga berkontribusi hingga 99,67 persen terhadap kinerja pertumbuhan penerimaan cukai. Faktor pendorong lainnya adalah kenaikan tarif efektif CHT, yang



disebabkan pertumbuhan produksi terutama dari pabrik rokok (PR) golongan 1.

Kinerja penerimaan cukai MMEA hingga akhir Februari 2019 adalah sebesar Rp 0,61 triliun. Kinerja tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 3,89 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu, atau mencapai 12,12 persen dari target APBN 2019. Performa MMEA tersebut didorong oleh produksi Golongan A yang mulai tumbuh sebesar 5,82 persen di bulan Februari 2019 ini. Sedangkan capaian penerimaan etil alkohol (EA) per Februari 2019 adalah sebesar Rp 0.02 triliun atau 13.50

persen dari target APBN tahun 2019.

Penerimaan bea keluar (BK) sampai dengan bulan Februari 2019 adalah sebesar Rp0,63 triliun atau 14,27 persen dari target APBN tahun 2019. Kinerja BK mengalami pertumbuhan negatif 29,49 persen dibandingkan kinerja pada periode yang sama tahun 2018. Penurunan pertumbuhan tersebut diakibatkan oleh turunnya kinerja ekspor mineral terutama komoditas tembaga. Namun demikian terdapat beberapa komoditas ekspor terkena BK yang mengalami pertumbuhan seperti produk kelapa sawit, nikel dan bauksit, biji kakao, serta kayu dan kulit.

Tuai Hasil Positif, Bea Cukai Rilis Hasil Survei Dampak Ekonomi Fasilitas Kawasan Berikat Dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor



Bea Cukai merilis survei manfaat ekonomi dari fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), hasil kerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan University Network for Indonesia Export Development (UNIED). Hasilnya, kedua fasilitas tersebut memberi dampak positif dalam mendorong perekonomian di berbagai sektor Industri di seluruh wilayah di

Indonesia. Selain itu, Bea Cukai juga mengeluarkan aturan baru sistem aplikasi KITE berbasis online (e-KITE) yang menyederhanakan aturan dan ditujukan untuk memperluas rantai pasok bahan sebagai substitusi barang impor, memperluas saluran ekspor hasil produksi, dan mengakomodasi perkembangan proses bisnis.

Resume hasil pengukuran dampak ekonomi KB dan KITE secara nasional untuk tahun 2017, antara lain:

1. Rasio ekspor terhadap impor sebesar 2,40, artinya setiap 1 dollar bahan baku yang diimpor menghasilkan 2,40 dollar produk yang diekspor;
2. Kontribusi nilai ekspor Rp780,83 triliun atau setara 34,37 persen nilai ekspor nasional;
3. Nilai tambah terhadap perekonomian Rp402,5 triliun;
4. Jumlah tenaga kerja diserap 1,95 juta orang dan 97 persennya diisi oleh tenaga kerja lokal;
5. Penerimaan pajak pusat mencapai Rp85,49 triliun dan pajak daerah mencapai Rp5,11 triliun;
6. Nilai investasi yang dihasilkan mencapai Rp178,17 triliun; dan
7. Menciptakan indirect economy activities, seperti tumbuhnya 95.251 jaringan usaha langsung, dan 268.509 usaha tidak langsung yang meliputi usaha akomodasi, perdagangan, makanan, dan transportasi.

Survei kali ini merupakan survei kedua yang dilakukan oleh Bea Cukai dan hasilnya tidak jauh berbeda dari

survei pertama, yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Survei ini dilakukan untuk memastikan bahwa dampak ekonomi fasilitas KB dan KITE tetap positif, di samping juga untuk merumuskan penajaman formulasi kebijakan selanjutnya. Mengingat berbagai dampak positif yang timbul dari pemanfaatan kedua fasilitas tersebut, maka Bea Cukai terus menciptakan inovasi untuk meningkatkan ekspor. Kali ini, Bea Cukai telah memperbarui peraturan KITE Pembebasan dan KITE Pengembalian.

Peraturan baru merupakan deregulasi dan penyederhanaan peraturan sebelumnya. Bea cukai telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK.04/2018 dan nomor 161/PMK.04/2018 yang berlaku pada 18 Februari 2019. Beberapa inovasi yang Bea Cukai lakukan dengan diberlakukannya aturan baru ini antara lain:

1. Menciptakan perizinan operasional dan transaksional KITE secara online;
2. Mempercepat janji layanan pengembalian Bea Masuk;

3. Membuka peluang pemasukan dan pengeluaran melalui PLB; melakukan monitoring terkait PIB dan PEB perusahaan.
4. Memberikan kemudahan bagi perusahaan dengan menghapuskan LPE dan menyiapkan LHPRE yang tersedia otomatis secara sistem sebagai pengganti LPE; Fasilitas KB dan KITE terbukti telah memberikan dampak ekonomi yang positif bagi perekonomian salah satunya dalam mendorong ekspor nasional. Hasil pengukuran dampak ekonomi juga menjadi dasar penentuan kebijakan KB dan KITE ke depan. Misalnya hasil survei menunjukkan bahwa industri padat karya berorientasi pada fasilitas KB sedangkan industri padat modal berorientasi pada fasilitas KITE. Selain itu juga sebaran fasilitas KB dan KITE menunjukkan adanya pilihan wilayah industri di Pulau Jawa.
5. Melakukan relaksasi ketentuan pengenaan sanksi bagi perusahaan KITE Pembebasan; Pilihan orientasi-orientasi tersebut akan kembali kepada efisiensi dan produktivitas dari masing-masing industri, antara lain:
6. Memberikan fasilitas pembebasan atas impor barang contoh;

Reeksport untuk bahan baku sisa serta tidak sesuai spesifikasi dan membuka kesempatan perusahaan untuk mengajukan penyelesaian dan pelunasan tagihan lebih awal tanpa menunggu jatuh tempo.

Bea Cukai juga telah merilis aplikasi KITE berbasis online (e-KITE). Aplikasi tersebut dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk menyampaikan pertanggungjawaban dan pengajuan pengembalian Bea Masuk secara online, melakukan pengajuan konversi maupun perbaikan konversi secara online, dan

1. Mengoptimalkan ekspor dari sektor perkebunan dan peternakan melalui KB Hortikultura dan KB sapi;
2. Mengoptimalkan ekspor industri pangan dari olahan CPO melalui KB hilirisasi CPO;
3. Mengoptimalkan serapan tenaga kerja pada industri TPT dan alas kaki melalui KB dan KITE TPT dan alas kaki; dan
4. Mengembangkan industri kreatif dan industri tematik melalui KB fashion muslim.

Selain itu, pemberlakuan aturan baru terkait KITE merupakan salah satu komitmen Pemerintah untuk membantu industri dalam rangka mendorong pertumbuhan ekspor, sehingga diharapkan kemudahan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh perusahaan.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Awal tahun 2019 PNBPN menunjukkan capaian kinerja yang positif

Realisasi PNBPN s.d. 28 Februari 2019 (dalam miliar Rupiah)	2019		Realisasi		Growth
	APBN	28 Februari 2019	% thd APBN		
I. Penerimaan Negara Bukan Pajak	378.297,86	39.912,20	10,55		1,29
A. Penerimaan SDA	190.754,77	21.421,61	11,23		(1,36)
1. Migas	159.778,31	15.932,99	9,97		(1,59)
a. Minyak Bumi	118.606,71	15.932,99	13,43		(1,59)
b. Gas Alam	41.171,60	-	-		-
2. Non Migas	30.976,46	5.488,62	17,72		(0,66)
a. Pertambangan Minerba	24.960,72	4.884,41	19,57		(1,71)
b. Kehutanan	4.511,54	462,18	10,24		3,21
c. Perikanan	625,81	114,72	18,33		35,51
d. Pend. Per. Panas Bumi	878,38	27,32	3,11		17,79
B. Pendapatan dari KND	45.589,30	2,33	0,01		4.561,90
C. PNBPN Lainnya	94.069,33	16.203,10	17,22		(0,41)
D. Pendapatan BLU	47.884,45	2.285,16	4,77		61,27

Sampai dengan tanggal 28 Februari 2019, realisasi PNBPN mencapai Rp39,91 triliun atau 10,55 persen dari APBN tahun 2019. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,29 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Kenaikan ini antara lain disebabkan adanya kenaikan pada

Pendapatan BLU yaitu naik sebesar 61,27 persen dari periode yang sama pada tahun 2018.

Realisasi penerimaan SDA Migas mencapai Rp15,93 triliun atau 9,97 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2019. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar

1,59 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yaitu sebesar Rp16,19 triliun. Penurunan penerimaan SDA Migas tersebut antara lain disebabkan lebih rendahnya realisasi ICP periode bulan Januari-Februari 2019 sebesar USD 58,93 per barel, dibandingkan ICP bulan Januari – Februari 2018 sebesar USD 63,60 per barel.

Realisasi penerimaan SDA Non Migas mencapai Rp5,49 triliun atau 17,72 persen dari target APBN tahun 2019. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 0,66 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018 yaitu sebesar Rp5,52 triliun. Penurunan ini diantaranya disebabkan rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) pada periode Januari – Februari 2019 sebesar USD 92,11 per ton, lebih rendah dibandingkan HBA periode Januari - Februari 2018 sebesar USD 98,12 per ton. Penurunan HBA ini antara lain dipengaruhi oleh kebijakan proteksi impor batubara Tiongkok dan India.

Dari sektor Kekayaan Negara Disahkan, realisasi baru mencapai Rp2,33 miliar. Hal tersebut disebabkan karena BUMN baru akan menyelenggarakan RUPS pada bulan Maret atau April sehingga realisasi penerimaan baru akan tercatat secara signifikan pada bulan April atau setelahnya.

Realisasi penerimaan PNBPN Lainnya mencapai Rp16,20 triliun atau 17,22 persen dari target APBN tahun 2019. Realisasi tersebut mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 0,41 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018 yang mencapai Rp16,27 triliun.

Untuk pendapatan BLU, hingga 28 Februari 2019 terealisasi sebesar Rp2,28 triliun atau mencapai 4,77 persen dari target APBN tahun 2019, meningkat 61,27 persen dari periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp1,42 triliun. Kenaikan pendapatan BLU tersebut antara lain dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan BLU Kesehatan dan Pendidikan.

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sampai Februari tahun 2019 meningkat dari segi penyerapan dan pertumbuhan.

Realisasi BPP sampai dengan akhir Februari 2019 telah mencapai Rp145,68 triliun atau sekitar 8,91 persen dari pagu APBN tahun 2019. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa realisasi BPP sedikit meningkat dibandingkan

tingkat penyerapan BPP tahun sebelumnya sebesar 8,77 persen dari pagu APBN tahun 2018. Peningkatan realisasi tersebut ditopang oleh meningkatnya realisasi belanja K/L dari 6,51 persen terhadap pagu APBN tahun 2018 menjadi 8,33 persen

Realisasi Belanja
Pemerintah
Pusat

Belanja Pemerintah Pusat (triliun Rupiah)	2018	Realisasi		
	APBN	s.d. Feb 2018	% thd APBN	% Growth
Belanja K/L	855,45	71,23	8,33	29,06
Belanja Pegawai	224,41	28,14	12,54	10,97
Belanja Barang	344,64	15,21	4,41	32,41
Belanja Modal	189,34	4,27	2,26	(4,33)
Bantuan Sosial	97,06	23,60	24,31	70,10
Belanja Non K/L	778,89	74,46	9,56	2,86
Pembayaran Bunga Utang	275,89	34,05	12,34	(1,10)
Subsidi	224,32	10,72	4,78	19,67
Jumlah	1.634,34	145,68	8,91	14,19

Foto:
Media Keuangan/
Anas

terhadap pagu APBN tahun 2019. Sedangkan realisasi belanja NonK/L sedikit menurun dari 11,92 persen terhadap pagu APBN tahun 2018 menjadi 9,56 persen terhadap pagu APBN tahun 2019.

Dari sisi jenis belanja, peningkatan persentase realisasi BPP yang terbesar adalah pada belanja bantuan sosial. Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, realisasi belanja bantuan sosial sampai dengan 28 Februari 2019 telah mencapai 24,31 persen terhadap pagu APBN tahun 2019, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 17,96 persen dari pagu APBN tahun 2018. Tingginya realisasi tersebut disebabkan oleh: (i) pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I dengan indeks bantuan yang meningkat pada komponen kesehatan dan pendidikan, (ii) percepatan pencairan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk bulan Februari sampai dengan April 2019 dibayarkan pada bulan Februari 2019, (iii) realisasi Bantuan Pangan Non Tunai, dan (iv) realisasi Bansos lainnya (antara lain, Program Indonesia Pintar dan bidik misi). Realisasi belanja barang mengalami peningkatan dari 3,39 persen terhadap pagu APBN tahun 2018 menjadi 4,41 persen terhadap pagu APBN tahun 2019. Selain itu, belanja modal juga mengalami peningkatan dari 2,19 persen terhadap pagu APBN tahun

2018 menjadi 2,26 persen terhadap pagu APBN tahun 2019. Peningkatan belanja barang dan belanja modal tersebut diharapkan telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah agar realisasi BPP tidak lagi menumpuk pada triwulan III dan IV.

Realisasi pembayaran bunga utang sampai dengan akhir Februari 2019 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi bulan Februari 2019 sebesar 12,34 persen dari pagu APBN tahun 2019. Sedangkan realisasi pembayaran bunga utang pada periode yang sama tahun 2018 sebesar 14,43 persen dari pagu APBN tahun 2018. Penurunan tersebut terutama karena kondisi yield SBN yang stabil cenderung turun di awal tahun 2019 dibandingkan tren naik di awal 2018. Selain itu, terdapat perubahan komposisi penerbitan dan perbedaan jadwal pembayaran kupon SBN seri benchmark yang menyebabkan pola pembayaran bunga bulanan setiap tahun bersifat dinamis. Dan untuk BPP yang lain, realisasinya relatif tidak berbeda dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

A. REALISASI BELANJA K/L TAHUN 2019

Realisasi Belanja K/L sampai dengan 28 Februari 2019 mencapai Rp71,23 triliun atau 8,33 persen dari pagu APBN tahun 2019. Realisasi belanja K/L tersebut

lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja K/L pada periode yang sama tahun 2018 sebesar 6,91 persen. Rata-rata belanja K/L tersebut masih didominasi oleh 15 K/L terbesar, utamanya Kementerian Sosial yang telah merealisasikan pencairan Program Keluarga Harapan (PKH). Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penyerapan belanja K/L antara

lain kelanjutan kebijakan percepatan pelaksanaan kegiatan melalui lelang dini, dan percepatan penyaluran bantuan sosial seperti PKH, beasiswa untuk mahasiswa miskin berprestasi (bidik misi), dan bantuan iuran dalam rangka jaminan kesehatan nasional bagi rakyat miskin (PBI) untuk mendukung keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Tabel
Perkembangan
Penyerapan
Belanja K/L

dalam triliun Rupiah

No.	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2018			2019		
		APBN	Realisasi s.d. 28 Februari	% thd APBN	APBN	Realisasi s.d. 28 Februari	% thd APBN
1	KEMEN PU PERA	107,39	4,55	4,37	110,73	4,00	3,61
2	KEMENHAN	107,68	5,97	5,20	108,36	7,17	6,62
3	POLRI	95,03	6,78	6,90	86,19	8,60	9,97
4	KEMENAG	62,15	3,47	5,47	62,07	4,09	6,60
5	KEMENSOS	41,30	5,09	29,40	58,91	15,06	25,57
6	KEMENKES	59,10	10,18	18,21	58,75	10,26	17,47
7	KEMENKEU	45,68	3,81	9,39	45,16	4,50	9,97
8	KEMENHUB	48,20	1,57	3,52	41,55	1,63	3,91
9	KEMENRISTEK DIKTI	41,28	2,31	5,85	41,26	2,06	4,99
10	KEMENDIKBUD	40,09	1,07	2,83	35,99	1,55	4,31
11	KEMENTAN	23,82	0,66	2,75	21,69	0,53	2,45
12	KEMENKUMHAM	10,59	1,21	10,82	13,31	1,33	9,98
13	MA	8,26	1,05	12,85	8,28	1,07	12,93
14	KEMENLU	7,25	0,24	3,37	7,91	0,34	4,28
15	KKP	7,29	0,32	3,53	5,48	0,33	5,98
15 K/L dengan Pagu Terbesar		705,12	48,29	6,85	705,63	62,52	8,86
K/L Lainnya		142,31	6,90	4,85	149,82	8,71	5,81
JUMLAH		847,44	55,19	6,91	855,45	71,23	8,33

dalam triliun Rupiah

No.	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBN	Nilai Kontrak
1	KEMEN PU PERA	110,73	20,09
2	KEMENHAN	108,36	9,12
3	KEMENHUB	41,55	6,12
4	POLRI	86,19	3,08
5	KEMENKUMHAM	13,31	1,97
6	KEMENKEU	45,16	1,02
7	KPU	18,10	0,84
8	KEMENRISTEK DIKTI	41,26	0,45
9	BSSN	2,31	0,44
10	KEMENKES	58,75	0,32
10 K/L dengan Nilai Kontrak Terbesar		525,72	43,45
KL Lainnya		329,73	4,71
Total KL		855,45	48,16

Sumber : OMSPAN run 6 Maret 2019

Tabel
Perkembangan
Realisasi Belanja
Modal 10 K/L
Terbesar.

Sementara itu, sampai dengan akhir Februari, nilai kontrak dari kegiatan K/L yang telah dilaporkan mencapai Rp48,16 triliun atau 25,44 persen dari pagu belanja modal. Tiga K/L yang telah melakukan kontrak belanja modal dengan nilai terbesar adalah Kemen PU PERA, Kemenhan, dan Kemenhub. Kemen PU PERA telah melakukan kontrak sebesar Rp20,09 triliun atau 26,52 persen dari pagu belanja modal. Kemenhan telah melakukan kontrak sebesar Rp9,12 triliun atau 28,42 persen dari pagu belanja modal. Kemenhub telah melakukan kontrak sebesar Rp6,12 triliun atau 25,58 persen dari pagu belanja modal.

**B. REALISASI BELANJA NONK/L
TAHUN 2019**

Realisasi belanja Non K/L sampai dengan Februari 2019 mencapai Rp74,46 triliun atau mencapai 9,56 persen dari pagu APBN tahun 2019. Realisasi belanja Non K/L tersebut lebih tinggi secara nominal dibanding dengan tahun 2018 yang mencapai Rp72,39 triliun atau 11,92 persen dari APBN 2018. Namun demikian, secara persentase terhadap APBN, belanja Non K/L mengalami penurunan, antara lain disebabkan oleh menurunnya belanja pembayaran imbalan SBSN dalam negeri yang menyebabkan pembayaran bunga utang menurun.

dalam triliun Rupiah

Belanja NonK/L	2019		% thd APBN	% Growth APBN
	APBN	s.d Feb 2019		
al. 1. Belanja Pegawai	157,15	29,31	18,65	2,00
2. Belanja Barang	0,59	0,00	0,24	-
3. Pembayaran Bunga Utang	275,89	34,05	12,34	(1,10)
4. Subdisi	224,32	10,72	4,78	19,67
5. Belanja Hibah	1,94	0,00	0,14	-
JUMLAH	778,89	74,46	9,56	2,86

Tabel Realisasi
Belanja non-K/L
s.d Februari 2019

Realisasi belanja subsidi sampai dengan Februari 2019 mencapai 4,78 persen dari pagu APBN tahun 2019. Realisasi belanja subsidi tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi belanja subsidi tahun sebelumnya yang mencapai 5,73 persen. Kondisi ini disebabkan oleh sebagian besar merupakan pencairan belanja subsidi energi, yaitu subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan subsidi listrik.

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Wujudkan komitmen Pemerintah mengatasi Ketimpangan antar Daerah, Realisasi Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa masih sesuai target

Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada APBN Tahun 2019 yang ditetapkan sebesar Rp826,77 triliun, telah terealisasi sebesar Rp126,14 triliun (15,26 persen) per 28 Februari 2019. Realisasi penyaluran tersebut lebih tinggi Rp4,69 triliun jika dibandingkan dengan penyaluran TKDD periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp121,45 triliun (15,76 persen).

A. DANA PERIMBANGAN

Sebagai komponen terbesar dalam struktur TKDD, Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp724,59 triliun atau 87,64 persen dari keseluruhan alokasi TKDD dalam APBN Tahun 2019. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp524,22 triliun, dan Dana Transfer Khusus (DTK) sebesar Rp200,37 triliun. Hingga 28 Februari 2019, realisasi Dana Perimbangan mencapai Rp120,05 triliun atau 16,57 persen dari pagu APBN 2019. Realisasi tersebut lebih tinggi sebesar Rp3,97 triliun

dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp116,08 triliun, atau 17,16 persen dari pagu APBN 2018.

1. DANA TRANSFER UMUM (DTU)

DTU terdiri dari DBH dan DAU. Sesuai nomenklaturinya, penggunaan DTU oleh daerah sifatnya relatif fleksibel sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. DTU memiliki peranan yang sangat penting bagi APBD karena merupakan penopang utama penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan umum daerah. Per 28 Februari 2019, realisasi DTU berjumlah Rp113,61 triliun, atau 21,67 persen dari pagu anggaran DTU sebesar Rp524,22 triliun. Capaian tersebut meningkat Rp5,88 triliun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp107,73 triliun atau 21,95 persen dari pagu alokasi.

a. Dana Alokasi Umum (DAU)

Pada tahun 2019 ini, Pemerintah mengalokasikan DAU sebesar

Rp417,87 triliun yang terdiri dari DAU reguler sebesar Rp414,87 triliun dan DAU tambahan untuk bantuan pendanaan kelurahan sebesar Rp3,00 triliun.

Kinerja realisasi penyaluran DAU reguler relatif stabil dari tahun ke tahun, karena disalurkan secara rutin sebesar 1/12 setiap bulannya. Sampai dengan 28 Februari 2019, realisasi penyaluran DAU reguler telah mencapai Rp103,70 triliun atau 24,99 persen, lebih tinggi sebesar Rp4,24 triliun bila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp99,45 triliun atau 24,77 persen. Realisasi penyaluran DAU reguler tersebut dipengaruhi oleh adanya penundaan penyaluran DAU terhadap 21 Pemerintah Daerah yang belum menyampaikan laporan Informasi Keuangan Daerah (IKD) sebesar Rp89,82 miliar. Selain itu, realisasi penyaluran tersebut juga telah memperhitungkan: (i) Penyaluran kembali DAU sebesar

Rp6,1 miliar kepada 2 daerah yang telah menyampaikan laporan IKD, (ii) Penyelesaian kewajiban DOB pada 2 daerah sebesar Rp 4 miliar, (iii) penyelesaian kewajiban tunggakan iuran jaminan kesehatan kepada Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) oleh 8 daerah sebesar Rp45,46 miliar.

Realisasi penyaluran DAU tambahan sampai dengan 28 Februari 2019 adalah sebesar Rp30,35 miliar yang diberikan kepada 8 pemerintah daerah, yaitu Kota Tasikmalaya, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Jembrana, Kab. Manggarai, Kab. Kuningan, Kab. Lombok Timur, Kab. Rote Ndao, dan Kab. Nagekeo. Penyaluran DAU tambahan ini berbeda dengan DAU reguler, karena DAU tambahan disalurkan dalam dua tahap masing-masing sebesar 50 persen.

Untuk penyaluran DAU tambahan tahap I, pemerintah daerah harus menyampaikan persyaratan berupa perda APBD atau perkara perubahan

penjabaran APBD yang memuat anggaran DAU tambahan serta surat pernyataan kepala daerah yang menyatakan telah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan kelurahan baik dari DAU tambahan maupun APBD TA 2019. Sedangkan untuk penyaluran tahap II, dilaksanakan setelah daerah menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan DAU Tambahan tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit 50 persen dari dana yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

b. Dana Bagi Hasil (DBH)

Realisasi penyaluran DBH hingga 28 Februari 2019 adalah sebesar Rp9,88 triliun atau 9,29 persen dari pagu alokasi DBH TA 2019 sebesar Rp106,35 triliun, meningkat Rp1,61 triliun jika dibandingkan dengan realisasi pada periode sama tahun 2018 yang hanya mencapai Rp8,27 triliun atau 9,27 persen dari pagu alokasi DBH TA 2018 sebesar Rp89,22 triliun.

Penyaluran DBH Triwulan I TA 2019 pada bulan Februari dilakukan untuk sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp5,67 triliun atau sebesar 20 persen dari pagu alokasi selain Tambahan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus yang direncanakan akan disalurkan pada bulan Maret. Sedangkan pada bulan Januari dilakukan untuk DBH SDA sektor Mineral Batu Bara, sektor Panas Bumi, dan sektor Perikanan

dengan total sebesar Rp4,21 triliun.

2. DANA TRANSFER KHUSUS (DTK)

Melalui kebijakan DTK, Pemerintah Pusat mengambil peranan untuk mempengaruhi pola belanja daerah dalam upaya mengurangi kesenjangan layanan antardaerah. Hal tersebut dilakukan melalui earmarking (pengarahan/penentuan) penggunaan dari DTK itu sendiri. Dalam APBN 2019, DTK dianggarkan sebesar Rp200,37 triliun, terdiri atas DAK Fisik sebesar Rp69,33 triliun dan DAK Nonfisik sebesar Rp131,04 triliun. Hingga 28 Februari 2019, realisasi penyaluran DTK mencapai Rp6,44 triliun, atau 3,21 persen dari pagu APBN 2019.

a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

DAK Fisik merupakan salah satu dana transfer yang ditujukan untuk percepatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur di daerah yang terkait dengan pelayanan dasar untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM). DAK Fisik Tahun Anggaran 2019 terdiri dari 3 Jenis DAK Fisik dan 14 Bidang dengan Pagu Anggaran sebesar Rp69,33 triliun naik sebesar 11,03 persen dari tahun 2018 sebesar Rp62,44 triliun.

Berdasarkan PMK Nomor 121 Tahun 2018, penyaluran DAK Fisik tahap I dilakukan paling cepat bulan Februari dengan syarat berupa: (i) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; (ii) laporan

realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis dan/atau per bidang tahun anggaran sebelumnya yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (iii) rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga teknis terkait; dan (iv) daftar kontrak kegiatan. Untuk memastikan pemenuhan persyaratan penyaluran DAK Fisik sesuai dengan PMK tersebut, Kementerian Keuangan c.q. DJPK telah mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk memantau pemenuhan persyaratan penyaluran DAK Fisik per tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sampai dengan saat ini, belum ada Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat penyaluran sebagaimana dimaksud.

b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik

Realisasi penyaluran DAK Nonfisik per 28 Februari 2019 mencapai Rp6,44 triliun, atau 4,91 persen dari pagu alokasi dalam APBN 2019. Capaian tersebut lebih rendah Rp1,91 triliun bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp8,35 triliun atau 6,76 persen dari pagu APBN 2018.

Sesuai ketentuan, penyaluran DAK Nonfisik dilakukan paling cepat bulan Januari untuk dana BOS dan secara bertahap dilanjutkan pada bulan Februari 2019.

Kementerian Keuangan terus berupaya meningkatkan realisasi penyaluran DAK Nonfisik melalui koordinasi dengan K/L pengampu untuk mendorong daerah mempercepat penyampaian laporan DAK Nonfisik dan mengoptimalkan penyerapan dana.

B. DANA INSENTIF DAERAH (DID)

Pada APBN 2019, pagu DID ditetapkan sebesar Rp10,00 triliun. Hingga akhir Februari 2019, realisasi penyaluran DID berjumlah Rp0,92 triliun, atau 9,21 persen dari pagu. Adanya realisasi jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018, dimana belum ada realisasi penyaluran DID sama sekali. Per 28 Februari 2019, telah dilakukan penyaluran DID tahap I sebesar 50 persen dari pagu kepada 56 Pemerintah Daerah yang sudah menyampaikan persyaratan berupa: (i) Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2019; (ii) Rencana penggunaan DID Tahun Anggaran 2019; dan (iii) Laporan realisasi penyerapan DID Tahun Anggaran 2018 bagi daerah yang menerima DID Tahun Anggaran 2018. Penyaluran tahap II dapat dilakukan paling cepat bulan Juli sebesar 50 persen dengan

persyaratan Pemerintah Daerah telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana tahap I yang menunjukkan penyerapan minimal 70 persen.

C. DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA

Dalam APBN 2019, pagu Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada Provinsi Aceh, serta Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur pada Provinsi Papua dan Papua Barat ditetapkan sebesar Rp20,98 triliun. Dari jumlah tersebut, hingga akhir Februari 2019 belum terdapat penyaluran Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI). Hal tersebut disebabkan Penyaluran Tahap I dilaksanakan paling cepat pada bulan Maret.

Sementara dari pos Dana Keistimewaan Provinsi DI Yogyakarta (DIY), sampai dengan 28 Februari 2019, terdapat realisasi penyaluran sebesar Rp180,00 miliar atau 15 persen dari pagu alokasinya di tahun 2019. Realisasi tersebut meningkat sejumlah

Rp30,00 miliar dibanding realisasi tahun lalu yang sebesar Rp 150 miliar.

D. DANA DESA

Dana Desa dalam APBN Tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp70,00 triliun. Hingga akhir Februari 2019, realisasi penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD telah mencapai Rp5,00 triliun, atau 7,14 persen dari pagu alokasinya. Realisasi tersebut sedikit lebih rendah Rp0,23 triliun jika dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp5,23 triliun atau 8,71 persen dari pagu alokasi. Lebih rendahnya realisasi penyaluran Dana Desa disebabkan karena belum dipenuhinya persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai dengan PMK Nomor 193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam rangka mempercepat penyaluran Dana Desa Tahap I, Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) akan terus mendorong daerah untuk segera menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I kepada KPPN.

Realisasi TKDD Tahun Anggaran 2018 dan 2019

Tanggal : 1 Januari s.d. 28 Februari 2019

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2018			2019		
	Alokasi	Realisasi	% thd APBNP	Alokasi	Realisasi	% thd APBN
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	766.162,58	121.455,18	15,76	826.772,53	126.141,78	15,26
Transfer ke Daerah	706.162,58	116.228,38	16,46	756.772,53	121.146,69	16,01
A. Dana Perimbangan	676.602,99	116.078,38	17,16	724.592,59	120.046,14	16,57
1. Dana Transfer Umum	490.714,92	107.727,11	21,95	524.223,75	113.608,75	21,67
a. Dana Bagi Hasil	89.225,34	8.273,46	9,27	106.350,16	9.881,57	9,29
b. Dana Alokasi Umum	401.489,58	99.453,65	24,77	417.873,58	103.727,18	24,82
2. Dana Transfer Khusus	185.888,07	8.351,27	4,49	200.368,84	6.437,38	3,21
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	62.436,26	-	-	69.326,70	-	-
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	123.451,81	8.351,27	6,76	131.042,14	6.437,38	4,91
B. Dana Insentif Daerah	8.500,00	-	-	10.000,00	920,55	9,21
C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY	21.059,58	150,00	0,71	22.179,94	180,00	0,81
1. Dana Otsus	20.059,58	-	-	20.979,94	-	-
a. Provinsi Papua dan Papua Barat	8.029,79	-	-	8.357,47	-	-
b. Provinsi Aceh	8.029,79	-	-	8.357,47	-	-
c. Dana Tambahan Infrastruktur	4.000,00	-	-	4.265,00	-	-
2. Dana Keistimewaan D.I.Y	1.000,00	150,00	15,00	1.200,00	180,00	15,00
Dana Desa	60.000,00	5.226,80	8,71	70.000,00	4.995,09	7,14

PEMBIAYAAN UTANG

Kenaikan Alokasi Sukuk Negara Berbasis Proyek
Guna Mendukung Pembangunan Infrastruktur

Meskipun target defisit anggaran pada APBN 2019 turun menjadi 1,84 persen dari sebelumnya 2,19 persen pada APBN 2018, Pemerintah masih mengutamakan sumber pembiayaan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun 2019 ini. Hal tersebut dilakukan seiring dengan rencana Pemerintah untuk menurunkan target penerbitan SBN berdenominasi asing dan meningkatkan porsi penerbitan SBN berdenominasi rupiah. Dengan meningkatkan porsi penerbitan SBN berdenominasi rupiah, Pemerintah terus melakukan upaya pendalaman pasar dalam negeri. Pada tahun 2019 ini pula akan terdapat peningkatan yang signifikan untuk obligasi ritel yang rencananya akan diterbitkan sebanyak Rp60 triliun sepanjang 2019.

Hingga akhir Februari 2019 realisasi pembiayaan untuk SBN telah mencapai Rp197,10 triliun rupiah

atau 50,67 persen dari target yang ditetapkan pada APBN 2019 yang besarnya Rp388,96 triliun. Sementara penarikan pinjaman luar negeri mencapai Rp7,671 triliun atau sebesar 12,73 persen dari target APBN 2019. Disisi lain, untuk pinjaman dalam negeri, hingga akhir Februari 2019 belum ada kegiatan penarikan serta pembayaran cicilan. Dengan demikian secara keseluruhan pembiayaan utang telah mencapai Rp198,37 triliun atau 55,22 persen dari target APBN 2019 yang terdiri atas SBN dan Pinjaman Luar Negeri.

Realisasi SBN pada Februari 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi penerbitan pada Februari 2018, hal ini terjadi selain karena dijalkannya strategi front loading, juga ada kegiatan pembayaran SBN yang telah jatuh tempo di tahun 2019 (refinancing). Penerbitan SBN yang cukup tinggi di awal tahun 2019 juga dilakukan untuk memperkuat

Foto:
Dok. Biro KLI

(dalam Triliun Rupiah)

Pembiayaan Utang	2019		
	APBN	s.d. 28 Februari	% APBN
Total	359.250,6	198.366,3	55,22%
1. Surat Berharga Negara (Neto)	388.957,9	197.096,7	50,67%
2. Pinjaman (Neto)	(29.707,3)	1.269,6	-4,27%
a. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	482,4	0,0	0,00%
i. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	1.956,4	0,0	0,00%
ii. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman DN	(1.473,9)	0,0	0,00%
b. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(30.189,7)	1.269,6	-4,21%
i. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	60.280,5	7.671,1	12,73%
ii. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN	(90.470,2)	(6.401,6)	7,08%

cadangan devisa mengingat cadangan devisa awal tahun 2019 menurun. Cadangan devisa diperlukan untuk mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Salah satu jenis SBN yang diterbitkan pada Februari 2019 adalah green sukuk global senilai total USD2 miliar. Transaksi penerbitan Sukuk Global memanfaatkan waktu yang tepat setelah terjadinya volatilitas tinggi di pasar modal global dengan hasil mengalami kelebihan permintaan sebanyak 3,8 kali. Salah satu hasil positif dari penerbitan Sukuk Global pemerintah adalah terjadinya peningkatan cadangan devisa pada Februari 2019.

Pemerintah menyadari bahwa pembiayaan melalui utang memiliki biaya dan risiko, untuk itu Pemerintah bersungguh-sungguh dalam mengelola utang secara hati-hati (pruden) dan

akuntabel. Pengelolaan utang yang secara hati-hati ini ditunjukkan dengan menjaga jumlah utang pada batas yang aman serta mengendalikan portofolio utang untuk mencapai biaya yang rendah pada tingkat risiko yang minimal.

Dalam mengelola utang yang akuntabel, Pemerintah benar-benar memperhitungkan bahwa setiap rupiah utang yang dilakukan Pemerintah harus dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya produktif dan investasi dalam jangka panjang yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya agar tidak menimbulkan kerugian lebih besar lagi di masa depan. Pemerintah berkomitmen untuk melunasi kewajibannya kepada kreditor maupun investor dalam menjaga kepercayaan mereka dengan menganggarkannya dalam APBN 2019 yang telah disetujui wakil rakyat.

Posisi Utang Hinga Akhir Februari 2019

(dalam Triliun Rupiah)

	Februari 2018		Februari 2019	
	Nominal	Komposisi	Nominal	Komposisi
Total Utang Pemerintah Pusat	4.034,80	100,00%	4.566,26	100,00%
a. Pinjaman	777,54	19,27%	790,47	17,31%
1. Pinjaman Luar Negeri	771,76	19,13%	783,33	17,15%
Bilateral	331,24	8,21%	322,86	7,07%
Multilateral	396,02	9,82%	418,82	9,17%
Komersial	43,32	1,07%	41,66	0,91%
Suppliers	1,17	0,03%	-	0,00%
2. Pinjaman Dalam Negeri	5,78	0,14%	7,13	0,16%
b. Surat Berharga Negara	3.257,26	80,73%	3.775,79	82,69%
1. Denominasi Rupiah	2.359,47	58,48%	2.723,13	59,64%
Surat Utang Negara	1.988,32	49,28%	2.260,18	49,50%
Surat Berharga Syariah Negara	371,16	9,20%	462,95	10,14%
2. Denominasi Valas	897,78	22,25%	1.052,66	23,05%
Surat Utang Negara	726,45	18,00%	817,82	17,91%
Surat Berharga Syariah Negara	171,34	4,25%	234,84	5,14%
Rasio Utang thd PDB			30,33%	

“Momentum” atau waktu yang tepat seringkali menjadi penentu di segala aspek kehidupan dan aspek bernegara. Prinsip ini juga diterapkan dalam penerbitan SBN dimana strategi frontloading yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya dalam penerbitan SBN masih dilanjutkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tahun 2019. Strategi tersebut dilakukan mengingat tahun 2019 adalah tahun yang “unpredictable” dimana ketidakpastian pasar merupakan tantangan yang harus diwaspadai Pemerintah dalam mengelola Keuangan Negara. Dengan

frontloading pemerintah dapat mengantisipasi ketidakpastian di akhir tahun akan yield (imbal hasil) yang tinggi. Selain itu, strategi Pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dengan lebih fokus pada pendalaman pasar dalam negeri juga mempengaruhi keputusan menerapkan strategi frontloading ini.

Frontloading merupakan istilah yang digunakan untuk strategi penerbitan SBN di awal tahun dengan jumlah yang cukup banyak. Dengan demikian, penerbitan utang sampai dengan

akhir tahun menjadi lebih sedikit. Strategi frontloading yang diterapkan Pemerintah untuk pengadaan SBN mempengaruhi besaran utang Pemerintah hingga menyentuh Rp4.566,26 triliun serta meningkatnya rasio utang Pemerintah terhadap PDB menjadi 30,33 persen untuk akhir Februari 2018.

Rasio utang terhadap PDB yang menyentuh 30,33 persen masih berada pada taraf yang aman mengingat besaran utang Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara maksimum sebesar 60 persen dari PDB. Besaran utang Pemerintah sebesar 60 persen PDB merupakan adopsi dari Maastricht Treaty, perjanjian yang ditandatangani para anggota negara Eropa dalam rangka pembentukan Uni Eropa yang ditandatangani pada tanggal 7 Februari 1992. Perjanjian tersebut mengatur mengenai tingkat inflasi, pengelolaan keuangan pemerintah (defisit tahunan dan utang pemerintah), nilai tukar serta tingkat suku bunga jangka panjang.

Besaran utang Pemerintah pada akhir Februari 2019 terdiri atas SBN dengan komposisi 82,69 persen terhadap total utang (Rp3775,79 triliun) dan Pinjaman dengan komposisi 17,31 persen terhadap total utang (Rp790,47 triliun). Penerbitan SBN (Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara) untuk tahun 2019 masih

dimanfaatkan untuk pembiayaan proyek serta refinancing, sementara Pinjaman Luar Negeri diadakan pada tahun 2019 adalah untuk membiayai proyek serta untuk menutup defisit anggaran secara umum.

Pengadaan pembiayaan utang didasarkan atas 4 prinsip yaitu: (1) Prinsip kehati-hatian, yakni dengan menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas yang dan diupayakan menurun secara bertahap dalam jangka menengah. (2) Mendorong efisiensi biaya utang di tingkat risiko yang terkendali dan mendukung kesinambungan fiskal. (3) Mendorong pemanfaatan utang pada kegiatan produktif yang mendukung pencapaian target pembangunan, antara lain melalui pembiayaan investasi dalam rangka akselerasi pembangunan infrastruktur. (4) Menjaga komposisi utang dalam batas terkendali untuk pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi.

Arah kebijakan pembiayaan utang akan menyesuaikan dengan defisit APBN dimana pembiayaan melalui utang akan terus berkurang seiring dengan mengecilnya defisit APBN.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Kemenkeu Dorong Kepedulian Generasi Muda terhadap APBN Melalui Hackathon

Kementerian Keuangan selaku pengelola keuangan negara berkomitmen untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai APBN, bahwasanya APBN adalah #UangKita, uang rakyat Indonesia yang dikelola oleh Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata. Sebagai salah satu perwujudan komitmen ini, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Accenture dan Kalibrri menyelenggarakan kompetisi hackathon Generasi Peduli #UangKita pada 1-3 Maret 2019.

Dalam kompetisi hackathon bertema finansial pertama di Indonesia, Kementerian Keuangan mengundang generasi muda untuk turut ambil bagian sebagai agen perubahan bangsa. Tema "Generasi Peduli #UangKita" dipilih karena Kementerian Keuangan menyadari penuh pentingnya partisipasi generasi muda dalam mengawal pengelolaan dan pemanfaatan setiap rupiah dalam APBN. Menjadi suatu kebanggaan bagi Kementerian Keuangan bahwa acara ini memperoleh animo besar dari generasi muda. Dari sekitar 3.500 pendaftar, panitia melakukan proses seleksi ketat hingga akhirnya

terpilih 39 finalis yang dibagi menjadi 13 tim.

Ketiga belas tim dalam waktu 38 jam ditantang untuk menciptakan ide inovatif dan solusi teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan awareness dan sense of belonging generasi muda terhadap APBN. Harapan ini turut ditegaskan Menteri Keuangan dalam arahannya kepada para peserta. "Saya ingin 39 peserta ini akan membuat inovasi dan kemudian kita berharap

kita akan mendapatkan ide-ide baru bagaimana #UangKita itu di dalam kehadirannya di masyarakat, melalui berbagai aplikasi yang kalian akan desain juga mengenai bagaimana menciptakan aplikasi yang bisa makin membuat masyarakat kita tahu mengenai uang kita. Mungkin yang akan Anda kreasikan ini akan memberikan inspirasi juga bagi kami dan teman-teman di Kementerian Keuangan," ujar Menteri Keuangan.

Di akhir kompetisi, terpilih tiga tim dengan prototype platform aplikasi terbaik sebagai pemenang. Juara pertama adalah aplikasi DUIT (peDuli Uang kITa) yang dirancang oleh grup 8 yang beranggotakan Lidwina Kristantia (project manager), David Hukom (designer), dan Eko Simanjuntak (programmer). Melalui aplikasi DUIT, pengguna dapat mengakses APBN sekaligus memberikan saran dan mengawasi kinerja pemerintah. Aplikasi ini juga menyediakan layanan fitur personalisasi berupa pemantauan belanja per bulan dengan menggunakan geolocation di tiap provinsi dan sektor pembangunan. Pemenang kedua berhasil diraih Grup 2 dengan anggota Michael Kosastra, Setyono Dwi Utomo, Nur Ratna Sari yang mengusung tagar #PantauKita dan #TentukanKita. Sementara, Grup 5 dengan anggota Aqilah Khairunnisa, Alexander Pratama dan Ilham Firdausi Putra menjadi juara ketiga dengan aplikasi bertukar opini berbasis real time.

Ketiga grup pemenang dinilai juri dapat membaca karakteristik milenial dan mengemasnya dalam aplikasi yang menarik, praktis, inovatif, dan user friendly. Adapun dewan juri dalam kompetisi ini terdiri dari Staf Ahli bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi (OBTI) Kemenkeu Sudarto; Vice President of Products DANA Indonesia Rangga Wiseno; Managing Director Kalibrri Sanuk Tandon; dan Managing Director Technology Lead Accenture Indra Parman. Ke depannya, dewan juri mengharapkan para peserta terus menciptakan inovasi baru yang membawa perubahan positif bagi masyarakat



Green Global Sukuk Indonesia Meraih Penghargaan Internasional



Pemerintah Indonesia membuktikan komitmennya terhadap Kesepakatan Iklim Paris 2016, dimana Indonesia secara konsisten telah menunjukkan perkembangan yang menjanjikan dalam berbagai proyek pelestarian lingkungan, dan menarik investor asing yang semakin beralih ke praktik Sustainable Corporate Governance khususnya dalam pembiayaan berkelanjutan berbasis syariah.

Kekonsistenan komitmen Pemerintah Indonesia tersebut terrefleksi dengan berbagai prestasi dan pengakuan dunia internasional yaitu:

1. Asia Pacific Green/SRI Bond Deal of the Year dari Global Capital, Euromoney
2. SRI Bond, Islamic Issue dari IFR Asia
3. SRI Capital Market Issue of The Year dari IFR Asia
4. Sovereign Deal of the Year dari Islamic Finance News
5. Deals of the Year dari Islamic Finance News
6. Green Bond Pioneer Award dari Climate Bond Initiative

Penghargaan *International Islamic Issue of the Year dan SRI Capital Market Issue of the Year* dari International Financing Review Asia baru saja diterima Pemerintah Indonesia di Hong Kong pada tanggal 26 Februari 2019. Kemudian disusul pada tanggal 5 Maret 2019 memperoleh Annual Green Bond Pioneer Awards dari Climate Bonds Initiative di London. Penghargaan-penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Pemerintah menerbitkan Sukuk Negara di pasar internasional senilai USD3 miliar dan sekaligus termasuk keberhasilan menerbitkan Sukuk Negara di pasar internasional untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan (*Global Green Sukuk*) senilai USD1,25 miliar pada tanggal 1 Maret 2018.

Secara finansial, struktur *green bonds/sukuk* tidak berbeda dengan obligasi/sukuk pada umumnya yaitu memberikan imbalan (*return*) secara periodik berupa kupon yang dapat bersifat tetap (*fixed*) maupun mengambang (*variable/float*) dan pelunasan nominal obligasi/sukuk pada saat jatuh tempo. Green bonds/sukuk dapat diterbitkan

sebagai suatu asset-backed securities di mana penerbitannya dikaitkan secara langsung dengan suatu proyek infrastruktur tertentu yang dikategorikan "*hijau*", namun yang umum adalah dana hasil penerbitan green bonds/sukuk (use of proceeds) dialokasikan untuk mendanai portofolio proyek-proyek yang dikategorikan "*hijau*".

Jika kita ingat kembali, Penerbitan Indonesia Global Green Sukuk pada tanggal 1 Maret 2018 merupakan penerbitan green sukuk pertama kalinya di dunia yang dilakukan oleh negara (the world's first sovereign green sukuk). Penerbitan ini berhasil dilaksanakan dengan memanfaatkan waktu yang tepat setelah terjadinya volatilitas yang tinggi di pasar keuangan global, yang didorong oleh ekspektasi inflasi Amerika Serikat dan peningkatan suku bunga The Fed.

Indonesia Global Green Sukuk berhasil mengumpulkan total penawaran sebesar USD3 miliar (oversubscribed 2,5 kali) dengan diversifikasi investor yang luas, baik dari segi geografi maupun tipe investor, termasuk sebanyak 29 persen didistribusikan untuk investor green yaitu investor yang hanya menempatkan investasinya pada instrumen ramah lingkungan.

Komitmen, kontribusi dan keseriusan Pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan syariah di dunia dan juga dalam mengatasi perubahan iklim, yang diwujudkan melalui penerbitan instrumen pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan pada akhirnya menarik dunia internasional untuk memberi penghargaan terhadap Indonesia.

Realisasi APBN s.d. 28 Februari 2018 dan 2019

(dalam miliar rupiah)

URAIAN	2018			2019		
	APBNP	Realisasi s.d. 28 Feb	% thd APBNP	APBN	Realisasi s.d. 28 Feb	% thd APBNP
A. PENDAPATAN NEGARA	1.894.720,3	200.724,9	10,59%	2.165.111,8	217.213,4	10,03%
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.893.523,5	200.577,3	10,59%	2.164.676,5	217.150,7	10,03%
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.618.095,5	161.173,6	9,96%	1.786.378,7	177.238,5	9,92%
a. Pajak Dalam Negeri	1.579.395,5	154.848,8	9,80%	1.743.056,9	170.919,4	9,81%
b. Pajak Perdagangan Internasional	38.700,0	6.324,8	16,34%	43.321,8	6.319,1	14,58%
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	275.428,0	39.403,7	14,31%	378.297,9	39.912,2	10,55%
II. HIBAH	1.196,9	147,6	12,33%	435,3	62,7	14,40%
B. BELANJA NEGARA	2.220.657,0	249.033,6	11,21%	2.461.112,1	271.825,6	11,04%
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.454.494,4	127.578,4	8,77%	1.634.339,5	145.683,7	8,91%
1. Belanja K/L	847.435,2	55.189,0	6,51%	855.445,8	71.226,3	8,33%
2. Belanja Non /L	607.059,2	72.389,4	11,92%	778.893,7	74.457,4	9,56%
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	766.162,6	121.455,2	15,85%	826.772,5	126.141,9	15,26%
1. Transfer ke Daerah	706.162,6	116.228,4	16,46%	756.772,5	121.146,8	16,01%
2. Dana Desa	60.000,0	5.226,8	8,71%	70.000,0	4.995,1	7,14%
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(87.329,5)	(13.880,0)	15,89%	(20.115,0)	(20.560,7)	102,22%
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	(325.936,6)	(48.308,6)		(296.000,2)	(54.612,1)	
% Surplus / (Defisit) Anggaran thd PDB	(2,19)	(0,33)		(1,84)	(0,34)	
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I+II+III+IV+V)	325.936,6	59.564,8	18,27%	296.000,2	197.564,9	66,74%
I. PEMBIAYAAN UTANG	399.219,4	58.507,4	14,66%	359.250,6	198.366,3	55,22%
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(65.654,3)	0,0	0,00%	(75.900,3)	(2.000,0)	2,64%
III. PEMBERIAN PINJAMAN	(6.690,1)	1.017,1	-15,20%	(2.350,0)	1.196,9	-50,93%
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(1.121,3)	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	183,0	40,3	22,02%	15.000,0	1,7	0,01%

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

